



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 298 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber dayamanusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Rumusan ASB adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan dan merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variable cost*.

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan:

- a. untuk menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II MUATAN ASB

Pasal 4

Muatan ASB terdiri dari:

- a. definisi;
- b. rumusan ASB; dan
- c. alokasi objek belanja.

Pasal 5

- (1) Definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan jenis ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Rumusan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan Rumusan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisikan objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Objek Belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase minimal, ideal dan maksimal berdasarkan total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan disetiap belanja di masing-masing kegiatan.
- (3) Alokasi Objek Belanja dan prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian Objek Belanja pada setiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan diluar dari objek belanja yang tercantum dalam alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar alokasi objek belanja atas seijin Tim Anggaran Pendapatan Daerah dengan batasan prosentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk setiap rincian objek, dengan syarat prosentase jumlah dan/atau jumlah rupiah tidak melebihi dari batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 195/SK-BUP/HK/2018 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dinyatakan berlaku sampai dengan selesainya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2019.

- b. Perangkat Daerah wajib mempedomani dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2020.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Analisis Standar Belanja, maka penyesuaian dan pemuktahiran akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Agustus 2019
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2019, TANGGAL 7 AGUSTUS 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

A. Beberapa pengertian dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

1. Program adalah bentuk instrumen penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
2. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
3. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
4. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
5. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
6. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
7. Pengendali belanja (cost driver) merupakan faktor - faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
8. Belanja Tetap adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
9. Belanja Variabel adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
10. Standar Satuan Harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.

- B. Jenis ASB Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:
- I. ASB PADA SEKRETARIAT, DINAS, BADAN, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN RSUD

NO ASB	NAMA ASB
I-01	PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN UNTUK OPD
I-02	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN GEDUNG KANTOR YANG BERSIFAT RINGAN
I-03	ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI BANGUNAN YANG BERSIFAT SEDANG DAN BERAT
I-04	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
I-05	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN
I-06	PENDAMPINGAN ATAU PEMBINAAN ATAU FASILITASI
I-07	PEMBERIAN PENGHARGAAN / APRESIASI KINERJA PERSONAL
I-08	PEMBERIAN PENGHARGAAN / APRESIASI KINERJA LEMBAGA
I-09	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL
I-10	ADMINISTRASI KEGIATAN BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
I-11	ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK (BELANJA MODAL)
I-12	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN TANAH (BELANJA MODAL)
I-13	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL)
I-14	ADMINISTRASI KEGIATAN YANG BERSIFAT PERENCANAAN (BELANJA MODAL)
I-15	ADMINISTRASI KEGIATAN YANG BERSIFAT PERENCANAAN (BELANJA JASA KONSULTANSI)
I-16	BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS MASYARAKAT
I-17	BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI
I-18	FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP DAERAH
I-19	FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI INTERN OPD
I-20	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INTERN OPD
I-21	MONITORING/PENGAWASAN/PENGENDALIAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN ANTAR OPD DI LINGKUP DAERAH
I-22	PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
I-23	PENYUSUNAN DOKUMEN
I-24	SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT
I-25	SOSIALISASI KEPADA PEGAWAI
I-26	KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN
I-27	KEGIATAN YANG BERSIFAT FESTIVAL ATAU PAMERAN
I-28	ADMINISTRASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ATAU PENYUSUNAN APLIKASI
I-29	ADMINISTRASI PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI ATAU APLIKASI
I-30	PEMELIHARAAN WEB DESIGN (PENAMBAHAN ATAU UPDATE HALAMAN WEB)
I-31	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
I-32	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT (OPERASIONAL PUSKESMAS)
I-33	REHABILITASI LAHAN PERTANIAN (MINIMAL LUAS TANAH 2 Ha)
I-34	ADMINISTRASI PENYEBARLUASAN INFORMASI ATAU PUBLIKASI ATAU PROMOSI
I-35	PEMBUKAAN LAHAN BARU UNTUK TANAMAN (MINIMAL LUAS TANAH 10 Ha)
I-36	PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
I-37	PENANGANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
I-38	FASILITASI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

II. ASB PADA KECAMATAN

NO ASB	NAMA ASB
II-01	PENDAMPINGAN ATAU PEMBINAAN ATAU FASILITASI
II-02	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN FISIK (BELANJA MODAL)
II-03	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN FISIK (BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT)
II-04	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL)
II-05	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL
II-06	FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI
II-07	MONITORING/PENGAWASAN/PENGENDALIAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN KECAMATAN
II-08	PENYUSUNAN DOKUMEN
II-09	BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS / SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT
II-10	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN GEDUNG KANTOR YANG BERSIFAT RINGAN
II-11	KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN
II-12	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
II-13	FASILITASI PELAKSANAAN MTQ

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 50 TAHUN 2019, TANGGAL 7 AGUSTUS 2019
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

I. ASB PADA SEKRETARIAT, DINAS, BADAN, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA DAN RSUD

ASB I-01 PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN UNTUK OPD

Definisi

Penyusunan dokumen rutin OPD adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen seperti Renja OPD, RKA OPD, DPA OPD, LAKIP dan Laporan Keuangan yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam sebagai penyelenggara pemerintahan.

Pengendali Belanja

- Jumlah Pegawai Yang Menyusun Dokumen dan Tahapan Kegiatan (Orang Tahapan Kegiatan)
- Jumlah Buku Yang Diperbanyak

Rumusan ASB:

$Y = \text{Rp. } 23.714.330 + (\text{Rp. } 908.470 \times X1) + (\text{Rp. } 764.120 \times X2) + \text{Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber} + \text{Belanja Transportasi dan Akomodasi}$

Dimana :

Y = Total Belanja

X1 = Jumlah Pegawai Yang Menyusun Dokumen dan Tahapan Kegiatan (Orang Tahapan Kegiatan)

X2 = Jumlah Buku Yang Diperbanyak

Belanja Tetap = Rp. 23.714.330

Belanja Variabel 1 = Rp. 908.470

Belanja Variabel 2 = Rp. 764.120

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	36%	67%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	6%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	8%	16%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	8%	19%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	46%	87%
Jumlah		100%	
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		Seijin TAPD	12%
Belanja Transportasi dan Akomodasi		Seijin TAPD	10%

- B. Jenis ASB Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:
- I. ASB PADA SEKRETARIAT, DINAS, BADAN, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN RSUD

NO ASB	NAMA ASB
I-01	PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN UNTUK OPD
I-02	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN GEDUNG KANTOR YANG BERSIFAT RINGAN
I-03	ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI BANGUNAN YANG BERSIFAT SEDANG DAN BERAT
I-04	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
I-05	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN
I-06	PENDAMPINGAN ATAU PEMBINAAN ATAU FASILITASI
I-07	PEMBERIAN PENGHARGAAN / APRESIASI KINERJA PERSONAL
I-08	PEMBERIAN PENGHARGAAN / APRESIASI KINERJA LEMBAGA
I-09	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL
I-10	ADMINISTRASI KEGIATAN BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
I-11	ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK (BELANJA MODAL)
I-12	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN TANAH (BELANJA MODAL)
I-13	ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL)
I-14	ADMINISTRASI KEGIATAN YANG BERSIFAT PERENCANAAN (BELANJA MODAL)
I-15	ADMINISTRASI KEGIATAN YANG BERSIFAT PERENCANAAN (BELANJA JASA KONSULTANSI)
I-16	BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS MASYARAKAT
I-17	BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI
I-18	FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP DAERAH
I-19	FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI INTERN OPD
I-20	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INTERN OPD
I-21	MONITORING/PENGAWASAN/PENGENDALIAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN ANTAR OPD DI LINGKUP DAERAH
I-22	PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
I-23	PENYUSUNAN DOKUMEN
I-24	SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT
I-25	SOSIALISASI KEPADA PEGAWAI
I-26	KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN
I-27	KEGIATAN YANG BERSIFAT FESTIVAL ATAU PAMERAN
I-28	ADMINISTRASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ATAU PENYUSUNAN APLIKASI
I-29	ADMINISTRASI PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI ATAU APLIKASI
I-30	PEMELIHARAAN WEB DESIGN (PENAMBAHAN ATAU UPDATE HALAMAN WEB)
I-31	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
I-32	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT (OPERASIONAL PUSKESMAS)
I-33	REHABILITASI LAHAN PERTANIAN (MINIMAL LUAS TANAH 2 Ha)
I-34	ADMINISTRASI PENYEBARLUASAN INFORMASI ATAU PUBLIKASI ATAU PROMOSI
I-35	PEMBUKAAN LAHAN BARU UNTUK TANAMAN (MINIMAL LUAS TANAH 10 Ha)
I-36	PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
I-37	PENANGANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
I-38	FASILITASI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monitoring dan Evaluasi
2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penyusunan Laporan Keuangan
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengelolaan dan Penataan Arsip Perangkat Daerah
5	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Penyusunan dokumen evaluasi, pelaporan dan perencanaan
6	RSUD DAYAKU RAJA	Penyusunan dokumen evaluasi, pelaporan dan perencanaan
7	RSUD DAYAKU RAJA	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Perencanaan Aset
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Serta Monev
9	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev
10	SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev
11	SEKRETARIAT DP. KORPRI	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev
12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPKAD
13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penyusunan dokumen perencanaan serta dan laporan kinerja
14	DINAS SOSIAL	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
17	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Penyusunan Laporan Keuangan
18	SEKRETARIAT DP. KORPRI	Penyusunan Laporan Keuangan
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyusunan laporan keuangan semesteran
20	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
21	DINAS PERKEBUNAN	Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi Kinerja
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
23	DINAS PERKEBUNAN	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LPPD
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan Prognosis dan Laporan Keuangan
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), RKA DPA dan RKAP DPPA
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyusunan RENJA, RENSTRA, LPPD, Capaian Kinerja Satpol PP
28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Reviu Dokumen Renstra
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Validasi Data dan Informasi Kepegawaian

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan dokumen laporan Keuangan, evaluasi, pelaporan dan perencanaan
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Inventarisasi Barang Milik Daerah
32	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan, Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja serta monev
33	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Renstra (review Renstra) dan evaluasi SPM Kesehatan
34	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
35	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyusunan dokumen evaluasi, pelaporan dan perencanaan
36	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Fasilitasi Penyusunan Rencana Strategis SKPD
37	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi Kinerja.
38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Rekapitulasi Data Kehadiran PNS dan THL
39	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penyusunan laporan keuangan semesteran
40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, Penyediaan Data dan Event Budaya beserta Publikasi
41	DINAS PARIWISATA	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja
42	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
43	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
44	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Inventarisasi Barang Milik Daerah
45	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan , pengendalian dan evaluasi kinerja
46	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Inventarisasi Barang Milik Daerah
47	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Inventarisasi Barang Milik Daerah
48	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev
49	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengelolaan Data PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
50	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD
51	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	Inventarisasi Aset (Barang Milik Daerah)
52	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pelaporan Teknis Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman
53	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	Inventarisasi Barang Milik Daerah
54	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir
55	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
56	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
57	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
58	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
59	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penyusunan Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan
60	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
61	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Rekonsiliasi Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bagian Setda Kab. Kukar
62	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Pengelolaan dan Validasi data Pembayaran Gaji,Tunjangan,Rapelan dan Gaji 13 PNSD dilingkungan Setda. Kab. Kukar
63	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Keuangan pada Bendahara Pengeluran Pembantu Bagian Penatausahaan Keuangan
64	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Penunjang Kelancaran Kegiatan Bendahara Pengeluaran Bupati / Wakil Bupati
65	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Fasilitasi Peningkatan Kinerja 12 Bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Setda. Kab. Kukar
66	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 12 Bagian Setda. Kab. Kukar
67	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Identifikasi Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara
68	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Fasilitasi Pengelolaan dan Validasi Permintaan Pembayaran Belanja Langsung 12 Bagian pada Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Kukar
69	BAGIAN PERLENGKAPAN	Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penyusunan Suplemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan.
70	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Inventarisasi Barang Milik Daerah
71	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi
72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
73	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri
74	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev
75	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Inventarisasi Barang Milik Daerah
76	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
77	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Inventarisasi Barang Milik Daerah
78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Evaluasi Kinerja Program Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah Bappeda
79	DINAS PEKERJAAN UMUM	Inventarisasi Barang Milik Daerah
80	DINAS PEKERJAAN UMUM	Penyusunan Perencanaan Strategik

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Inventarisasi Barang Milik Daerah
82	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyusunan Dokumen Pereencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev
83	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
84	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Penyusunan dokumen evaluasi, pelaporan dan perencanaan
85	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Penyusunan dokumen evaluasi, pelaporan dan perencanaan

ASB I-02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN GEDUNG KANTOR YANG BERSIFAT RINGAN

Definisi

Pemeliharaan Rutin/Berkala pada Bangunan Gedung Kantor yang bersifat ringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mempertahankan nilai ekonomis dari bangunan tersebut.

Pengendali Belanja

- Luasan Bangunan Yang Dipelihara (m2)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 11.487.245 + (\text{Rp. } 76.580 \times X)$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Luasan Bangunan Yang Dipelihara (m2)

Belanja Tetap = Rp. 11.487.245

Belanja Variabel = Rp. 76.580

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	8%	14%
Belanja Pemeliharaan	0%	92%	100%
Jumlah		100%	

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3	DINAS PERKEBUNAN	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4	DINAS SOSIAL	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6	INSPEKTORAT KABUPATEN	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9	RSUD DAYAKU RAJA	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rumah Sakit
10	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
11	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
12	INSPEKTORAT KABUPATEN	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
13	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rehab Sedang /Berat Kantor Dinas Perkim Bidang KPP
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

ASB I-03 ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI BANGUNAN YANG BERSIFAT SEDANG DAN BERAT

Definisi

Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang bersifat sedang dan berat adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal yang berupa rehabilitasi fisik yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keterangan :

ASB ini digunakan untuk nilai belanja rehabilitasi (belanja modal) diatas Rp. 100.000.000

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Modal (Rehabilitasi)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 45.344.320 + (0,005 X) + \text{Nilai Belanja Modal (Rehabilitasi)}$$

Dimana :

- Y = Total Belanja
- X = Nilai Belanja Modal (Rp)
- Belanja Tetap = Rp. 45.344.320
- Belanja Variabel = 0,005

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	39%	65%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	3%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	7%	10%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	5%	9%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	47%	90%
Jumlah		100%	
Belanja Modal			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS SOSIAL	Rehab Berat Taman Makam Pahlawan
2	INSPEKTORAT KABUPATEN	Rehabilitasi sedang gedung kantor
3	DINAS PERKEBUNAN	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi rumah dinas guru SDN 011 Muara Kaman
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 013 Muara kaman
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Rumah Dinas SDN 024 Muara kaman
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Berat RKB dan Ruang Dewan Guru SMPN 3 Desa Muara Muntai
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Berat RKB SMPN 1 Kecamatan Muara Wis
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Berat Platfon dan Lantai Sekolah SMPN 3 Muara Badak
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Berat RKB dan Ruang Dewan Guru SMPN 3 Desa Muara Muntai
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Berat RKB SMPN 1 Kecamatan Muara Wis
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Bert Platfon dan Lantai Sekolah SMPN 3 Muara Badak
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Bert Platfon dan Lantai Sekolah SMPN 3 Muara Badak
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perbaiki Halaman Sekolah SMPN 3 Muara Badak
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi SDN 007 Kel. Margomulyo Samboja
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi SDN 010 muara kaman
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehab SDN 039 Desa Tani Bakti Kec. Samboja
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehab Ruang Kelas SDN Fillial 022 Desa Benua Baru
21	DINAS KESEHATAN	Rehabilitasi Total Puskesmas
22	DINAS KESEHATAN	Rehabilitasi Ringan Puskesmas & Puskesmas Pembantu
23	DINAS KESEHATAN	Rehab Puskesmas Pembantu
24	DINAS PERHUBUNGAN	Rehab Dermaga Kumala
25	DINAS PERHUBUNGAN	Rehab Dermaga Aji Imbut
26	DINAS PERHUBUNGAN	Rehab Dermaga Kutai Lama
27	DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan prasarana balai/ gedung pengujian kendaraan bermotor

ASB I-04 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan memelihara kendaraan dinas baik operasional maupun jabatan yang berbentuk roda 4 dan roda 2 dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas keseharian kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Pengendali Belanja

- Jumlah Kendaraan Roda 4
- Jumlah Kendaraan Roda 2

Rumusan ASB

$Y = (\text{Rp. } 18.000.300 \text{ X1}) + (\text{Rp. } 900.450 \text{ X2}) + \text{Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Roda 3, Roda 6 dan Tanpa Roda)}$

Dimana :

Y = Total Belanja
X1 = Jumlah Kendaraan Roda 4
X2 = Jumlah Kendaraan Roda 2
Belanja Variabel 1 = Rp. 18.000.300
Belanja Variabel 2 = Rp. 900.450

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0%	100%	100%
Jumlah		100%	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Roda 6, Roda 3 dan Tanpa Roda)			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
2	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7	DINAS PERKEBUNAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9	DINAS SOSIAL	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
11	INSPEKTORAT KABUPATEN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
13	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
14	RSUD DAYAKU RAJA	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15	SEKRETARIAT DP. KORPRI	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
18	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
22	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
23	DINAS PARIWISATA	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
27	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
28	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
31	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
32	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
33	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
34	DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
35	BAGIAN UMUM	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
36	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
37	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
38	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
39	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
43	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
44	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
45	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
46	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
47	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
48	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
49	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
50	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

ASB I-05 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN

Definisi

Administrasi Kegiatan Pengadaan Pakaian adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja pakaian yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Pakaian

Rumusan ASB:

$$Y = \text{Rp. 465.300} + (0,052 X) + \text{Nilai Belanja Pakaian}$$

Dimana :

- Y = Total Belanja
X = Nilai Belanja Pakaian
Belanja Tetap = Rp. 465.300
Belanja Variabel = 0,052

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	45%	50%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	6%	9%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	17%	35%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	14%	20%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	18%	35%
Jumlah		100%	
Belanja Pakaian			

ASB I-06 PENDAMPINGAN ATAU PEMBINAAN ATAU FASILITASI

Definisi

Pembinaan/Fasilitasi/Pendampingan berdasarkan jumlah peserta adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap suatu topik tertentu. Pembinaan merupakan upaya untuk memberikan pengarahan atau bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan pada bidang yang dibina. Pembinaan lebih menekankan pada pendekatan yang praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Dengan definisi lain pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subyek dengan tindakan pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan (Poerwadarminta, 1987).

Pengendali Belanja

- Jumlah Lembaga/Orang yang di dampingi/di fasilitasi
- Lama Waktu Pelaksanaan Fasilitasi/Pendampingan

Rumusan ASB:

$Y = \text{Rp. } 33.123.570 + (\text{Rp. } 2.287.835 \times X1) + (\text{Rp. } 6.056.560 \times X2) + \text{Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu} + \text{Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga}$

Dimana :

- Y = Total belanja
X1 = Jumlah Lembaga/Orang yang di dampingi/di fasilitasi
X2 = Lama Waktu Pelaksanaan Fasilitasi/Pendampingan
Belanja Tetap = Rp. 33.123.570
Belanja Variabel 1 = Rp. 2.287.835
Belanja Variabel 2 = Rp. 6.056.560

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	10%	20%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	4%	11%
Belanja Jasa Kantor	0%	18%	42%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	2%	5%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	9%	26%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	30%	57%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0%	12%	28%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	15%	34%
Jumlah		100%	
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		Seijin TAPD	6%
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		Seijin TAPD	46%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia
2	DINAS SOSIAL	Fasilitasi pelayanan sosial lembaga kesejahteraan sosial Anak
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Penjualan BMD
5	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana
7	DINAS SOSIAL	Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar (OT), Eks Napi, Eks Psikotik, Eks Psiko sosial ke daerah asalnya
8	DINAS SOSIAL	Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar (OT), Eks Napi, Eks Psikotik, Eks Psiko sosial ke daerah asalnya
9	DINAS SOSIAL	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti
10	DINAS SOSIAL	pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC)
11	DINAS PERKEBUNAN	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun
12	DINAS SOSIAL	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Korban Bencana
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pemenuhan Sarana Damkar
15	INSPEKTORAT KABUPATEN	Penanganan Kasus TP-TGR
16	DINAS SOSIAL	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
17	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN
18	DINAS SOSIAL	Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial
19	DINAS SOSIAL	Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial
20	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang cacat dan eks trauma
21	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN)
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi penguatan lembaga PNFI
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Assistensi Pendataan Kebudayaan
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Hak Karya Intelektual (H K I)
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan kesenian daerah

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD, SMP
28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Guru S1/D4
29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi sekolah SMP
30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi SD
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Berbasis Online
32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Assistansi Pendataan SD dan SMP (Sosialisasi Aplikasi, verifikasi dan validasi data)
33	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Program Internship Dokter dan Nusantara Sehat
34	DINAS KESEHATAN	Pembinaan Pelayanan Kefarmasian
35	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Swasta/Klinik/ Institusi
36	DINAS KESEHATAN	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)
37	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Pencapaian Kabupaten Sehat
38	DINAS KESEHATAN	Pendampingan Pasca Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
39	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi pelaksanaan Puskesmas PKRT
40	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Fasilitasi Kreativitas/ Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda
41	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)
42	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)
43	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting)
44	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Petani Jagung
45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
46	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
47	DINAS PARIWISATA	Pembinaan Desa Wisata
48	DINAS PARIWISATA	Fasilitasi Mitra Pelaku Industri Pariwisata
49	DINAS PARIWISATA	Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha industri pariwisata
50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Penguatan Program Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten
51	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pembinaan dan Peningkatan Strata Posyandu
52	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan BUM Desa
53	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)
54	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)
55	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa
56	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pendampingan Musrenbang Desa
57	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA)

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
58	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak
59	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
61	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Forum Peduli ABK
62	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Kemitraan IKM dengan usaha waralaba
63	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi pengembangan IKM/KUB di ODTW
64	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Pedagang Kreatif Lapangan
65	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pembinaan dan Supervisi Penyuluh
66	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pendampingan UPSUS Padi, Jagung, Bawang, dan Cabe
67	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pendampingan UPSUS SIWAB
68	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS Regional III
69	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pengembangan promosi konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya lokal
70	BAGIAN HUKUM	Pendampingan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa
71	BAGIAN HUKUM	Penanganan Perkara/Kasus Perdata, TUN, dan Pidana
72	BAGIAN HUKUM	Fasilitasi Perencanaan dan pembahasan rancangan peraturan daerah
73	BAGIAN HUKUM	Fasilitasi Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati
74	BAGIAN HUKUM	Pengendalian Penyusunan Surat Keputusan
75	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Asrama Mahasiswa dan Pelajar Kab. Kutai Kartanegara
76	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Badan Layanan Umum Daerah
77	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Manasik, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji
78	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Tim Pembina UKS
79	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
80	BAGIAN ORGANISASI	Fasilitasi Evaluasi SOP Kabupaten
81	BAGIAN ORGANISASI	Evaluasi Standar Pelayanan Kabupaten

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
82	BAGIAN PEMBANGUNAN	Fasilitasi Pendamping Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional
83	BAGIAN PEMERINTAHAN	Fasilitasi Penanganan Permasalahan/ Kasus-kasus di bidang Pemerintahan Umum
84	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Fasilitasi Renja 12 Bagian Sekretariat Daerah
85	BAGIAN PERLENGKAPAN	Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Regulasi
86	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pendampingan dalam rangka Pembuatan Bahan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pemkab
87	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah (PD)
88	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Fasilitasi penyelesaian Prosedure, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
89	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Monitoring Pendampingan Penerapan Aplikasi SIL di Kecamatan se Kab. Kukar serta Update Aplikasi SIL ke Kementerian Kominfo RI
90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pembinaan Penanaman Modal
91	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi Pengelolaan Kampung KB

ASB I-07 APRESIASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PERSONAL

Definisi

Apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau prestasi. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai ataupun masyarakat umum.

Pengendali Belanja

- Jumlah Yang Menerima Penghargaan atau yang Berprestasi

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 48.322.970 + (\text{Rp. } 3.498.840 \times X) + \text{Belanja Honorarium Narasumber/ Tenaga Ahli} + \text{Belanja Transportasi dan Akomodasi}$

Dimana

Y = Total Belanja

X = Jumlah Penerima Penghargaan atau Apresiasi

Belanja Tetap = Rp. 48.322.970

Belanja Variabel = Rp. 3.498.840

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	8%	14%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	9%	14%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	3%	5%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	12%	22%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	44%	70%
Belanja Penghargaan/Hadiah	0%	24%	43%
Jumlah		100%	
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	Seijin TAPD		5%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	Seijin TAPD		9%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemilihan Guru, Kepsek, Pengawas berprestasi TK, SD, SMP
3	DINAS KESEHATAN	Tenaga Kesehatan Teladan
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penghargaan kalpataru
5	DINAS PARIWISATA	Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara

ASB I-08 APRESIASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA LEMBAGA

Definisi

Apresiasi atau penghargaan atas kinerja lembaga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau prestasi. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan lembaga-lembaga yang ada dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengendali Belanja

- Jumlah Lembaga Yang Menerima Penghargaan atau yang Berprestasi

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 51.492.750 + (\text{Rp. } 818.230 \times X)$$

Dimana

Y = Total Belanja

X = Jumlah Lembaga Penerima Penghargaan atau Apresiasi

Belanja Tetap = Rp. 51.492.750

Belanja Variabel = Rp. 818.230

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	5%	7%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	3%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	3%	6%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	5%	8%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	70%	87%
Belanja Penghargaan/Hadiah	0%	15%	35%
Jumlah		100%	

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS KESEHATAN	Penilaian fasilitas tingkat pertama Berprestasi
2	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Penilaian kesehatan simpan pinjam
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penilaian Kelas Kelompok Perikanan
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyelenggaraan CSR dan LKPM Award

ASB I-09 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Definisi

Administrasi Kegiatan Pengadaan Bahan Material adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja bahan material yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Bahan Material

Rumusan ASB:

$$Y = \text{Rp. } 12.844.460 + (0,096 X) + \text{Belanja Jasa Kantor} + \text{Belanja Bahan Material}$$

Dimana

Y = Total Belanja

X = Nilai Belanja Pengadaan Bahan Material (Bahan Material, Bahan Pakai Habis, Cetak dan Penggandaan dan Belanja Pakaian)

Belanja Tetap = Rp. 12.844.460

Belanja Variabel = 0,096

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	17%	30%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	38%	59%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	7%	34%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	4%	6%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	34%	76%
Jumlah		100%	
Belanja Jasa Kantor	Seijin TAPD		50%
Belanja Bahan Material			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	SEKRETARIAT DP. KORPRI	Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan
2	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat bagi korban kebakaran dan bencana
4	DINAS PERKEBUNAN	Pembibitan Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit)
5	RSUD DAYAKU RAJA	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
6	RSUD DAYAKU RAJA	Pengadaan bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
7	RSUD DAYAKU RAJA	Pengadaan Darah
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Neon Box Monumen Sanga - sanga
9	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Obat
10	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Perbekalan Kesehatan
11	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Buku KIA dan GPA
12	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Ravid Diagnostik Tes (RDT)
13	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Demplot Budidaya Jagung
14	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengembangan Perbenihan / Pembibitan Tanaman Pangan
15	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Peralatan Kerja Pekerja Harian Lepas
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Sarana dan perasanana perlengkapan kerja pertamanan
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengadaan Benih dan Induk Ungul Bagi BBI
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Fasilitasi Percontohan Budidaya Ikan Air Payau
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Fasilitasi Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Fasilitasi UPTD Balai Benih Ikan Tirta Mina Perjiwa
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Restocking Reservat
22	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah
23	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pengembangan Kawasan rumah pangan Lestari
24	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan material PKB, parkir kendaraan bermotor dan retribusi tambat kapal
25	BAGIAN PERLENGKAPAN	Pengadaan Souvenir / Plakat
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pengadaan Material LPJU
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

ASB I-10 ADMINISTRASI KEGIATAN BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Definisi

Administrasi Kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja barang baik berupa bahan material, barang dan pembangunan fisik yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup ASB ini adalah administrasi dalam pengadaan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat secara langsung kepada masyarakat ketika proses kegiatan tersebut berjalan.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 7.552.175 + (0,105 X) + \text{Nilai Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat}$

Dimana

Y = Total Belanja

X = Nilai Belanja Pengadaan Bahan Material (Belanja Bahan Material/Belanja Jasa Pihak Ketiga/Belanja Cetak dan Penggandaan)

Belanja Tetap = Rp. 7.552.175

Belanja Variabel = 0,105

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	14%	29%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	3%	4%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	3%	6%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	80%	90%
Jumlah		100%	
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PERKEBUNAN	Intesifikasi Tanaman Perkebunan
2	DINAS PERKEBUNAN	Peyediaan Sarana Panen Perkebunan
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan seragam anggota lembaga adat
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Perlengkapan Kesenian Kuda Lumping Turonggo Mudo
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bantuan Alat Musik kesenian kuda lumping Turonggo Budoyo Rt 9
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bantuan Alat Musik kesenian kuda lumping Turonggo Budoyo Rt 4
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bantuan Alat Rebana Nurul Jadid Rt 3
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan 1 set Gong Kecil lembaga Adat Dayak Kelompok Kesenian Runtiq Bulaw
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan 1 Set Seragam Tari Pak Geluk Toraja
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan 1 set Seragam Tari Dayak Benuaq
11	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengadaan pupuk kelompok Tani Desa Bukit pariaman dan Desa Bukit Raya
12	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Bagi Masyarakat Miskin
13	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengadaan Ternak Bagi Masyarakat Miskin
14	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengembangan budidaya tanaman buah-buahan unggul
15	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengembangan budidaya tanaman sayuran, tanaman hias dan biofarmaka
16	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Budidaya Jagung
17	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengembangan komoditi Jagung / Program Revolusi Jagung
18	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengembangan Ternak Ruminansia
19	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan saprodi untuk petani miskin
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pembentukan Sentra Kebun Bibit Rumput Laut
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan
23	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Penyaluran Hewan Qurban
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi TK Harapan Bangsa RT 7
25	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pembangunan sarana dan prasarana Koperasi dan UKM
26	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pembuatan Pintu saluran irigasi Kelompok tani Kelurahan Bukit Biru
27	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pembuatan/Peningkatan Jalan Pertanian
28	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pembuatan/peningkatan prasarana irigasi pertanian tesier/JITUT
29	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyediaan Jembatan Tambat (Jetty) Kapal Nelayan

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pembangunan LPJU Tenaga Surya
32	DINAS SOSIAL	Fasilitasi alat bantu aksesibilitas bagi Orang dengan Kecacatan (ODK)
33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa (APE) PAUD
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Mebeluer termasuk Alat Praktik dan Praga Siswa (APE) PAUD
35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PEMBANGUNAN PAUD GRIYA AUDIA MANGKURAWANG
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Paket Sound System Yamaha DBR 15
37	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan alat kesenian Gambus / Tingkilan lembaga adat
38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Rebana Majelis Taklim At - Tauhid
39	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Buku penunjang pembelajaran paket A, B , dan C
40	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga
41	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
42	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Fasilitasi penyediaan peralatan olahraga (Cabor Sepatu Roda) Kab. Kukar
43	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Fasilitasi penyediaan peralatan olahraga (Cabor Gulat) Kab. Kukar
44	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Fasilitasi penyediaan peralatan olahraga (Cabor Pencak Silat) Kab. Kukar
45	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan
46	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengadaan peralatan kreativitas seni kepemudaan
47	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rehabilitasi Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara
48	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengadaan mesin spiner peniris minyak UMKM Kuala Samboja.
49	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengadaan mesin vacum press siller UMKM Kuala Samboja.
50	DINAS PARIWISATA	Pengadaan Perahu Motor Wisata
51	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengadaan mesin pengaduk gula merah
52	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Intensifikasi Pengembangan Padi sawah
53	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian
54	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan ALSINTAN budidaya dan pasca panen jagung
55	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Penyediaan ALSINTAN budidaya dan pasca panen untuk petani miskin
56	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Kabupaten kutai Kartanegara
57	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Sarana Air Bersih di Kelurahan Muara Kembang

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
58	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perdesaan (DAK Sanitasi Penugasan)
59	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Fasilitasi Sarana Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
60	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Revitalisasi Tambak Rakyat
61	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Digital Desa/Kelurahan(kampong pintar)
62	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pengadaan Sumor Bor

ASB I-11 ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK (BELANJA MODAL)

Definisi

Administrasi Kegiatan Pembangunan Fisik adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk fisik bangunan yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah .

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Rumusan ASB:

$$Y = \text{Rp. } 42.373.180- + (0,006 X) + \text{Belanja Modal}$$

Dimana :

Y = Total belanja
X = Nilai Belanja Modal
Belanja Tetap = Rp. 42.373.180
Belanja Variabel = 0,006

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	50%	78%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	4%	9%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	7%	10%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	6%	12%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	33%	60%
Jumlah		100%	
Belanja Modal			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PERKEBUNAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Proteksi Tanaman dan Pengendalian Kebakaran
2	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pembuatan Jalan Lingkar Tahap III
3	SEKRETARIAT DPRD	Pembuatan Jembatan Dari Ruang Paripurna dan Toilet Untuk Pimpinan
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
5	SEKRETARIAT DP. KORPRI	Pengadaan Travo dan Jaringan untuk perumahan KORPRI
6	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Peningkatan Parkir Rumah Sakit
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Sarana Ruang Pelayanan Pajak
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemasangan Paving Blok UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Badak
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Aula Kantor UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Badak
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Guru Ke. Muara Badak
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan TK Pembina
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Museum Kayu
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Fasilitas Umum Situs Noto Igomo
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Paving Blok Halaman SDN 024 Loa Kulu
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Toilet Murid dan Guru SD
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Meubelair Siswa SD
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan RKB SDN 001 Handil 6
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembuatan Gerbang Sekolah SD 025
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan rumah dinas guru SDN 010
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan rumah dinas guru SDN 02 muara wis
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kecamatan Muara Wis
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan RKB SMPN 4 Kecamatan Muara Wis
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemasangan Paving Blok Lingkungan Sekolah SMPN 04 Muara Badak
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan RKB SDN 009 Muara Badak
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 3 Muara Badak
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas SD
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Pagar SD
28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Jembatan Penghubung SDN 004 Muara Muntai
29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Pelataran dan Jembatan Penghubung SDN 001 Kota Bangun
30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Paving Blok Halaman SDN 024 Loa Kulu
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Toilet Murid dan Guru SD
32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan RKB SDN 001 Handil 6
33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembuatan Gerbang Sekolah SD 025
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan rumah dinas guru SDN 010
35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan rumah dinas guru SDN 02 muara wis
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lanjutan Pembangunan Pagar SMPN 3 Muara Muntai

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
37	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kecamatan Muara Wis
38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan RKB SMPN 4 Kecamatan Muara Wis
39	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemasangan Paving Blok Lingkungan Sekolah SMPN 04 Muara Badak
40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan RKB SDN 009 Muara Badak
41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lanjutan Pembangunan Gedung SD Filia No 019 RT Desa Batu Kec. Muara Badak
42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemasangan Paving Blok Lingkungan Sekolah SMPN 04 Muara Badak
43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan RKB SDN 009 Muara Badak
44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lanjutan Pembangunan Gedung SD Filia No 019 RT Desa Batu Kec. Muara Badak
45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 3 Muara Badak
46	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Gedung SDN 006 Desa Gas Alam Kec. Muara Badak
47	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan RKB SDN 003 Muara Badak
48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Pagar Halaman dan Turap Beton SDN 012 Desa Handil Terusan Kec. Anggana
49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Pagar dan Pengurukan Halaman SMPN 5 Kec. Marang Kayu
50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Pagar dan Pemasangan Paving Blok SDN 003 Kec. Marang Kayu
51	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan RKB SDN 011 Sungai Merdeka Samboja
52	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan RKB SDN 026 Sungai Merdeka Samboja
53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Turap Pasang Baru SDN 02 Sungai Seluang Samboja
54	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Kepala Muara Badak Sekolah SMPN 3 Muara Badak
55	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lanjutan Pembangunan RKB SD (KDP)
56	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lanjutan Pembangunan RKB SMP (KDP)
57	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Pagar SDN 019 Desa Handil Terusan Kec. Anggana
58	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Semenisasi Halaman SD
59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lanjutan Pembangunan pagar SDN 030 Muara Kaman
60	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan pagar SDN 002 Marangkayu
61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan pondok pesantren Alhidayah muara Kaman
62	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembuatan Sumur Bor dan Kelengkapannya di SD 022 Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu
63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PENIMBUNAN HALAMAN SMP 05
64	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	LANJUTAN PEMBUATAN RKB MTSI DDI KARYA BARU DESA BATUAH KM 30 LOA JANAN
65	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan pagar SDN. 005 dondang kel dondang
66	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Turap dan Pagar SD 008
67	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembuatan Pagar SDN 06
68	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan MTS Nurul Iman Muara kaman

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
69	DINAS KESEHATAN	Pembangunan puskesmas
70	DINAS KESEHATAN	Pembangunan puskesmas pembantu
71	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengadaan Sarana Prasarana Sekretariat DEKOPINDA
72	DINAS PARIWISATA	Penguatan dan Pengelolaan Pulau Kumala
73	DINAS PARIWISATA	Revitalisasi wahana permainan pulau kumala
74	DINAS PARIWISATA	Peningkatan Sarana Elektrifikasi P. Kumala
75	DINAS PARIWISATA	Fasilitas Ketangkasan (outbond)
76	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembangunan pasar desa di Kecamatan Anggana
77	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembangunan pasar desa di Kecamatan Kembang Janggut
78	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Peningkatan bangunan pasar rakyat
79	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembangunan petak pasar Rebo
80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembangunan petak pasar Wonotirto
81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembangunan gerbang parkir otomatis pasar Gerbang Raja
82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perbaikan pagar Pasar Gerbang Raja
83	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Revitalisasi Pasar Kecamatan
84	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembuatan loket pelayanan retribusi di pasar Gerbang Raja
85	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ternak
86	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di TPA Bekotok
87	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara (DAK Perumahan Reguler)
88	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Drainase Kelurahan sanga-Sanga Dalam (Culvert)
89	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembuatan Parit Kiri Kanan Jalan dan Gorong-Gorong Beringin 5 RT.40 Tembus ke RT.36 Kelurahan Melayu
90	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBUATAN PARIT RT.17 KELURAHAN LOA IPUH (800M)
91	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembuatan Turap Jalan Karya, Kel. Teluk Dalam Muara Jawa
92	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rehab Berat Jalan Jembatan Ulin Fl. Tobing Kec. Muara Muntai Ilir
93	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan di Desa Pendingin kec. Sanga Sanga
94	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Jalan Selimpat sampai Jalan Rumbia Kelurahan Panji Kec. Tenggarong.
95	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kec Tabang

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
96	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Bersih Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong
97	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan dan pengembangan unit distribusi instalasi pengolahan air bersih (IPA) Kelurahan Muara Jawa Ilir
98	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan IPA dan Optimalisasi jaringan pipa IKK di Kec. Kembang Janggut
99	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan IPA dan Optimalisasi jaringan pipa IKK di Kec. Anggana
100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan Menuju Ke Desa Jembayan Tengah Kec.Loa Kulu
101	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi di jalan Gunung Beniris Kel,Loa Ipuh Kec, Tenggarong
102	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Jaringan Pipa Menuju Dusun Bensamar Kecamatan Tenggarong
103	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pendukung Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPA) di Desa Badak Ulu Muara Badak (Bankeu)
104	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Jalan Beringin III dan IV Jl. Gn. Belah Kel. Loa Ipuh
105	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Jl. Setia Raya 7 Kel. Loa Ipuh
106	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Lanjutan Peningkatan jalan Diponegoro Dusun Rapak rejo
107	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Rumbia Jl. Kejawi Permai Kel. Baru
108	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01, RT. 02, Kel. Muara Kembang
109	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 & RT.08 Jembayan Dalam Kec.Loa Kulu
110	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Jembatan Ulin RT.12 Desa Muara Badak Ilir
111	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Jalan menuju SDN 013 Putaq RT.18
112	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 6,7 dan RT. 17 Kampung Baru Kel. Kuala Samboja
113	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Desa Sebulu Ilir
114	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Jalan Rangka Yuda Gg.3 Kelurahan Mangkurawang
115	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan jalan Lingkungan Azhifa Belida tembus Jalan Yang Alif Kel. Timbau
116	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Lanjutan semenisasi dan drainase jalan Beringin 5 RT 40 Kelurahan Melayu
117	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Jalan Keranji RT 39 bengkuring Kelurahan Loa Ipuh
118	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Jalan Agus Salim Rt.20 Desa Bukit Raya
119	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Relokasi Eks. Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang
120	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sidomulyo

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
121	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Lambur RT. XI Desa Rapak lambur Kec. Tenggarong
122	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung TPI Kecamatan Kota Bangun
123	DINAS PERHUBUNGAN	Pengembangan dan Perluasan Lahan Parkir
124	DINAS PERHUBUNGAN	Pembangunan Dermaga
125	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata
126	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Perlengkapan Jalan Dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
127	DINAS PERHUBUNGAN	Pembangunan Rambu Suar
128	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light/ Warning Light
129	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Anggana
130	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Loa Janan
131	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Muara Jawa
132	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan badan jalan Desa Suka Damai Kec. Muara Badak
133	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Marang Kayu
134	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Muara Badak
135	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Jembatan Amborawang Darat
136	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Di Kecamatan Loa Kulu
137	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan saluran drainase pembuangan menuju sungai Kuala Samboja
138	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengadaan lahan peningkatan jalur pasar mangkurawang menuju jalan pemuda
139	DINAS PEKERJAAN UMUM	Penurapan Jalan Oloy RT.6 Desa Kayu Batu, Muara Muntai
140	DINAS PEKERJAAN UMUM	Penurapan Sei Raden RT. 13 Kel. Handil Baru Kec. Samboja
141	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisata Di Kecamatan Tenggarong
142	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisata Di Kecamatan Tenggarong
143	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Taman Replika dan Pusat Budaya Waduk Panji Sukarame
144	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengendalian Banjir Di Kecamatan Tenggarong
145	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian Di Kecamatan Tenggarong
146	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian Di Kecamatan Loa Kulu
147	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jaringan DI Manunggal Daya Kec Sebulu
148	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jaringan DI Buana Jaya Tenggarong Seberang
149	DINAS PEKERJAAN UMUM	Normalisasi Parit Kelompok Tani Kejawi Permai C Desa Rapak lambur Kec. Tenggarong

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
150	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kecamatan Tenggarong
151	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Embung Desa Bukit Biru Kec. Tenggarong
152	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Embung Cipari Kecamatan Muara Kaman
153	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Kenohan
154	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Muara Wis
155	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Samboja
156	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Sebulu
157	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tabang
158	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong
159	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong
160	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Muara Kaman
161	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Kota Bangun
162	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Loa Kulu
163	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Marang Kayu
164	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Muara Badak
165	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Muara Jawa
166	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Anggana
167	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Anggana-Sidomulyo
168	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jembatan Di Kecamatan Anggana
169	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan jalan desa Batuq menuju ke desa Rebaq Rinding
170	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Wis menuju Kota Bangun Seberang
171	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Manunggal Daya Kec Sebulu
172	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Bilatalang Kec. Tabang
173	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong (Sanggulan-Rapak Lambur)
174	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Rapak Lambur - Mangkurawang
175	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Mangkuraja V
176	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong Seberang (Karang Tunggul menuju Bukit Raya)
177	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong Seberang (Bhuana Jaya)
178	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong Seberang (Loa Raya - Loa Pari)

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
179	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Loa Sakoh - Hambau
180	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan pendekat jembatan Martadipura
181	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan jalan Suka Bumi ke Kedang Ipil
182	DINAS PEKERJAAN UMUM	Perencanaan pembangunan jalan Kota Bangun 7 menuju Kedang Ipil
183	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan jembatan poros desa Sari Nadi Kecamatan Kota Bangun
184	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Mawar Dusun Tegal Arum Desa Kota Bangun I
185	DINAS PEKERJAAN UMUM	Lanjutan peningkatan jalan Desa Liang Ulu menuju desa Liang ilir
186	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Rapak Nyamuk menuju desa Ponoragan
187	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Singalawang Menuju Dusun Ukung Desa Jembayan Induk
188	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan RT.14-15 Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu
189	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Santan Ilir - Perbatasan Bontang
190	DINAS PEKERJAAN UMUM	Penanganan Longsoran Jalan di Kec. Loa Kulu
191	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rehabilitasi Jembatan Kelekat - Tabang
192	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Loa Kulu (Jonggon Desa)
193	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Loa Kulu (Desa Jonggon Jaya)
194	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Marang Kayu (Santan Tengah)
195	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Muara Badak (Ma. Badak - Marang Kayu)
196	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Muara Badak (Salo Cela)
197	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan dalam kota kecamatan Muara Badak
198	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Anggana (Desa Handil Terusan)
199	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Anggana (Tanjung Barukang Anggana)
200	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Padat Karya I Kec Anggana
201	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Tambak Rel III
202	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan haji Namu (Loa Ipuh Darat)
203	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Bukit Pariaman
204	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Gunung Beniris
205	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan Jalan Sungai Bawang Kec. Muara Badak
206	DINAS PEKERJAAN UMUM	Peningkatan jalan Desa Muara Aloh menuju Muara Leka
207	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara Di Kecamatan Anggana
208	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara Di Kecamatan Anggana
209	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara Di Kecamatan Tenggarong
210	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Gedung Serbaguna

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
211	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Pasar Anggana
212	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Kantor Kelurahan Mangkurawang
213	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Gedung Serba Guna BPU Desa Segihan
214	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Kantor Desa
215	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Masjid di Kelurahan Pendingin
216	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembangunan Masjid di desa Loa Duri
217	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pembuatan Jalan Lingkar Tahap III
218	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Peningkatan Parkir Rumah Sakit
219	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pembuatan Jalan Lingkar Tahap III
220	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Peningkatan Parkir Rumah Sakit

ASB I-12 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN TANAH (BELANJA MODAL)

Definisi

Administrasi Kegiatan Pengadaan Tanah Fisik adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah.

Keterangan :

ASB ini digunakan untuk nilai belanja modal pengadaan tanah diatas Rp. 200.000.000

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Modal Pengadaan Tanah

Rumusan ASB:

$$Y = \text{Rp. } 134.330.810 + (0,0214 X) + \text{Belanja Modal}$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Nilai Belanja Modal Pengadaan Tanah

Belanja Tetap = Rp. 134.330.810

Belanja Variabel = 0,0214

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	19%	35%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	6%
Belanja Jasa Kantor	0%	21%	50%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	3%	4%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	4%	7%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	51%	96%
Jumlah		100%	
Belanja Modal			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PERKEBUNAN	Lanjutan Pembebasan Lahan Penyaluran Bibit UPT Dinas Perkebunan Kec. Kembang Janggut
2	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Pembebasan Lahan Pasar Mangkurawang Tahap II
3	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan Lahan di Kecamatan Marang Kayu
4	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembebasan Lahan unit satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar (SKB)
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Sertifikasi lahan sekolah SD
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Sertifikasi lahan sekolah SMP
8	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Kesehatan
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Lahan TPA
10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Land Clearing Rusun di Tenggarong Seberang
11	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengadaan Lahan Jembatan Jahuq
12	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengadaan Lahan Pengendalian Banjir Kec. Muara Badak
13	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengadaan lahan Pembangunan Central Bisnis Distrik
14	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengadaan lahan jalan lais kec. Tenggarong

ASB I-13 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL)

Definisi

Administrasi Kegiatan Pengadaan Belanja Barang adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk barang atau peralatan dan perlengkapan kantor dan bukan berbentuk bangunan yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas kesehariannya.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Modal

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. 5.296.435} + (0,03 X) + \text{Belanja Modal}$$

Dimana :

- Y = Total Belanja
- X = Nilai Belanja Modal
- Belanja Tetap = Rp. 5.296.435
- Belanja Variabel = 0.03

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	30%	75%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	31%	65%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	4%	12%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	35%	87%
Jumlah		100%	
Belanja Modal			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
2	RSUD DAYAKU RAJA	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
3	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pengadaan Instalasi Listrik Gedung lama
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
6	DINAS SOSIAL	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
7	RSUD DAYAKU RAJA	Pengadaan Mobil Tangki Air
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengadaan peralatan gedung kantor
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengadaan peralatan gedung kantor
11	SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan peralatan gedung kantor
12	INSPEKTORAT KABUPATEN	Pengadaan peralatan gedung kantor
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengadaan peralatan gedung kantor
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
18	DINAS SOSIAL	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
19	SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
20	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan mebeleur
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer untuk UNBK SMP
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Meubelair SD 016
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Meubelair SDN 011 Kel. Sarijaya dan SD 013 Kel. Pendingin
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Kendaraan angkutan Anak Sekolah (fery)
28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Alat Musik Tradisional Dan Pakaian Adat Lengkap Untuk Sekolah Dasar 005 Tabang, Kec Tabang
29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Alat Musik Tradisional Dan Pakaian Adat Lengkap Untuk Sekolah Dasar 006 Tabang, Kec Tabang
30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemeliharaan sistem Jaringan
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Meubelair Siswa SD
32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer untuk UNBK SMP
33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Meubelair SD 016
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Meubelair SD 016
35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Meubelair SDN 011 Kel. Sarijaya dan SD 013 Kel. Pendingin
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Kendaraan angkutan Anak Sekolah (fery)

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
37	DINAS KESEHATAN	Pengadaan mobil jabatan
38	DINAS KESEHATAN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
39	DINAS KESEHATAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
40	DINAS KESEHATAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
41	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Mebelair
42	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Generator listrik (genset)
43	DINAS KESEHATAN	Pengadaan AC
44	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Mobil Ambulance
45	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Ambulance Air
46	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Alat Kesehatan
47	DINAS KESEHATAN	Pengadaan sarana & prasarana pelayanan Penanggulangan Bencana/KLB sesuai standar
48	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
49	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penataan lingkungan tempat kantor
50	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
51	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengadaan peralatan gedung kantor
52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pengadaan Sarana Pendukung Bank Sampah
53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
54	DINAS PARIWISATA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
55	DINAS PARIWISATA	Peningkatan Sarana Planetarium Jagat Raya
56	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
57	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
58	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
59	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyediaan mesin/peralatan pengolahan jagung
60	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengelolaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Tenggara Seberang
61	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
62	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Kec. Kota Bangun
63	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembuatan TPS kecamatan Tenggara Seberang
64	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Dump Truck Sampah
65	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Container Truck Sampah
66	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Bak Truck Sampah
67	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Gerobak Sampah
68	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Bidang KKP
69	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Fasilitasi Pengelolaan Rumah Sewa Mangkurawang

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
70	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengadaan pot dan bunga Bogenfille gerbang raja
71	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Sarana Prasarana Peralatan Teknis Bidang Penyehatan Lingkungan
72	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan peralatan gedung kantor
73	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengadaan mebeleur
74	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan
75	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
76	BAGIAN PERLENGKAPAN	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
77	BAGIAN PERLENGKAPAN	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
78	BAGIAN PERLENGKAPAN	Pengadaan peralatan gedung kantor
79	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pengadaan peralatan gedung kantor
80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pengadaan mebeleur
81	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara
82	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Depot Arsip
83	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
84	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Pengadaan peralatan gedung kantor
85	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengelolaan Tenaga Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)
86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengadaan peralatan gedung kantor
87	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
88	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadaan peralatan gedung kantor
89	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
90	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pengadaan Instalasi Listrik Gedung lama
91	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
92	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
93	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pengadaan Instalasi Listrik Gedung lama
94	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pengadaan perlengkapan gedung kantor

ASB I-14 ADMINISTRASI KEGIATAN YANG BERSIFAT PERENCANAAN (BELANJA MODAL)

Definisi

Administrasi Kegiatan Yang bersifat perencanaan adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai langkah awal dalam proses pembangunan secara fisik, jadi merupakan bagian dari keseluruhan proses pengadaan konstruksi dan seluruh penganggarnya masuk kedalam belanja modal dan akan menjadi aset.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Penyusunan Perencanaan (Belanja Modal)

Rumusan ASB:

$$Y = \text{Rp. } 4.463.120 + (0,072 X) + \text{Belanja Modal}$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Nilai Belanja Penyusunan Perencanaan (Belanja Modal)

Belanja Tetap = Rp. 4.463.120

Belanja Variabel = 0,072

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	36%	70%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	3%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	5%	8%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	16%	30%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	41%	69%
Jumlah		100%	
Belanja Modal			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Kab. Kutai Kartanegara
2	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR Wilayah Perkotaan Muara Badak dan Marangkayu
3	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR wilayah Perkotaan Tenggarong
4	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Substansi RDTR wilayah Perkotaan Tenggarong Seberang
5	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Kota Bangun
6	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Muara Jawa
7	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Muara Wis dan Muara Muntai
8	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Samboja dan Loa Janan
9	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Sanga-Sanga dan Anggana
10	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan KLHS Koreksi Perpetaan dan Kelengkapan Subtansi RDTR Wilayah Perkotaan Sebulu dan Muara Kaman
11	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Materi Teknis RDTR Kecamatan Loa Kulu
12	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Studi Kelayakan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah untuk Utilitas Terpadu Kota Tenggarong
13	DINAS KESEHATAN	Perencanaan Pembangunan/ Rehab/, renovasi dan perluasan Puskesmas
14	DINAS KESEHATAN	Perencanaan Pembangunan/ Rehab/, renovasi dan perluasan Puskesmas Pembantu
15	DINAS PARIWISATA	Penyusunan DED ODTW Waduk Panji Sukarame
16	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perencanaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu
17	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DED Intake dan WTP Kapasitas 100 Ltr/Dtk Batuah Kec. Loa Janan
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DED Intake dan WTP Kapasitas 250 Ltr/Dtk dan Pipa Distribusi Waduk Samboja
19	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Survey data Kondisi Existing Jalan dan Drainase pada Kawasan Permukiman
20	DINAS PERHUBUNGAN	Study Penyusunan Rencana Induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kab.Kukar
21	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan Rencana Induk/ Masterplan Penerapan Sistem Informasi Teknologi Bidang Perhubungan
22	DINAS PERHUBUNGAN	DED Fasilitas Dan Akses Jalan Dalam Pelabuhan Umum Muara Badak Ilir
23	DINAS PERHUBUNGAN	Kajian operasional manajemen lingkungan pelabuhan umum Muara Badak

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
24	DINAS PERHUBUNGAN	Amdal terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) Bongkar muat
25	DINAS PERHUBUNGAN	AMDAL pengerukan alur pelayaran pelabuhan umum Muara Badak
26	DINAS PERHUBUNGAN	DED Pembangunan Dermaga Wisata Pangempang
27	DINAS PERHUBUNGAN	Lanjutan Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan
28	DINAS PEKERJAAN UMUM	Penyusunan Rancangan Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Kutai Kartanegara
29	DINAS PEKERJAAN UMUM	Study Pengembangan Air Bawah Tanah Kab. Kutai Kartanegara
30	DINAS PEKERJAAN UMUM	Perencanaan Pembangunan Embung Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang

ASB I-15 ADMINISTRASI KEGIATAN YANG BERSIFAT PERENCANAAN (BELANJA JASA KONSULTANSI)

Definisi

Administrasi Kegiatan Yang bersifat perencanaan adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai langkah awal dalam proses pembangunan secara fisik, jadi merupakan bagian dari keseluruhan proses pengadaan konstruksi dan seluruh penganggarnya masuk kedalam belanja jasa konsultasi.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Penyusunan Perencanaan (Belanja Jasa Konsultasi)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 53.811.738 + (0,016 X) + \text{Belanja Jasa Konsultasi}$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Nilai Belanja Penyusunan Perencanaan (Belanja Jasa Konsultasi)

Belanja Tetap = Rp. 53.811.738

Belanja Variabel = 0,016

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	21%	34%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	3%	5%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	5%	10%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	8%	14%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	63%	90%
Jumlah		100%	
Belanja Jasa Konsultasi			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Perencanaan Pembangunan Tahura
2	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
3	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Perencanaan Pembuatan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyusunan FS TPA
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyusunan FS TPA Kec. Kota Bangun
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DED Pembangunan TPA Kec. Samboja
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DED Pembangunan TPA Kec. Marang Kayu
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Review Dokumen RP3KP
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perencanaan Kawasan Lahan Permukiman Relokasi Eks. Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang
10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perencanaan Drainase RT.3 dan RT. 4 Kel. Kuala Samboja
11	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perencanaan Teknis Mencari sumber air baku sumur dalam (Geolistik) untuk wilayah pantai Kab,kutai kartanegara
12	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perencanaan Pembangunan instalasi pengelolaan air bersih (IPA) Kapasitas 50 liter/ detik beserta sarana pendukungnya di desa Bukit Pariaman Kec, Tenggarong Seberang
13	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi menuju ke Desa Muara Sembilang Kec, Samboja
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyusunan Dokumen Study Kelayakan (FS) Pembangunan TPI Samboja
16	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyusunan Potensi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DED PENDALAMAN ZONA INTI KAWASAN RESERVAT
18	DINAS PERHUBUNGAN	Study Kajian Lingkungan Pengerukan Dermaga Wisata Pangempang
19	DINAS PERHUBUNGAN	Kajian Peningkatan Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Dan Keterpaduan Sistem Transportasi Antar Moda/Multi Moda
20	DINAS PERHUBUNGAN	DED Pengerukan Alur Dermaga Wisata Pangempang
21	DINAS PERHUBUNGAN	Kajian Konektifitas Pembangunan Pelabuhan Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan Ekonomi Kab Kukar
22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Penyusunan Dokumen Perencanaan /Kajian Pengembangan Energi baru Terbarukan
23	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Survey dan Identifikasi Panas Bumi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan /Kajian Pengembangan Energi baru Terbarukan Panas Bumi
25	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lampu Penerangan Jalan

ASB I-16 BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS MASYARAKAT

Definisi

Bimbingan teknis /Pelatihan Teknis pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan memberikan pelatihan secara teknis pada masyarakat dalam rangka memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan sesuai TUPOKSI.

Pengendali Belanja

- Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 66.915.900 + (\text{Rp. } 884.690 \times X)$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)

Belanja Tetap = Rp. 66.915.900

Belanja Variabel = Rp. 884.690

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	9%	9%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	7%	14%
Belanja Bahan/Material	0%	12%	21%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	2%	4%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0%	11%	34%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	8%	14%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	22%	41%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0%	9%	16%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	20%	28%
Jumlah		100%	

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PERKEBUNAN	Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan
2	DINAS SOSIAL	Pelatihan Keterampilan Usaha ekenomi prduktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
3	DINAS SOSIAL	Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat SD
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat Siswa SMP
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat SD
7	DINAS KESEHATAN	Pertemuan/Pelatihan Orientasi Kesehatan Haji
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pendidikan Dasar Satuan Pengamanan Stadion
9	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pelatihan Pelatih Bulu Tangkis
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pelatihan Tenaga Wasit Juri Pencak Silat
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Fasilitasi perkuatan permodalan bagi koperasi dan UKM
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah/ Fasilitasi pelatihan dan pemberdayaan usaha kecil Kelurahan Melayu
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah/ Pelatihan UMKM Muara jawa (bidang kewirausahaan mandiri)
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengembangan usaha masyarakat miskin usia produktif
15	DINAS PARIWISATA	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata
16	DINAS PARIWISATA	Pengembangan Komunitas Ekonomi Kreatif
17	DINAS PARIWISATA	Sertifikasi tenaga kerja usaha Industri pariwisata
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelatihan Manajemen BUM Desa
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan Kerja bagi Rumah Tangga Miskin
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelatihan /Pembekalan bagi Kepala Desa yang baru Terpilih
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Bimtek Siskeudes
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pelatihan dan Pengembangan Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Bimbingan Manajemen Usaha Perempuan

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelatihan pengolahan bonggol jagung dan pengolahan pangan dari tepung jagung
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembinaan kemampuan dan keterampilan pengolahan hasil industri olahan
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembinaan kemampuan dan keterampilan pengolahan hasil industri kerajinan
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembinaan dan Penguatan Sentra IKM
30	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Produksi Pupuk Organik dan Pestisida Nabati/Agens Hayati
31	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pertanian (pendampingan kegiatan DAK dan APBN)
32	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pembinaan dan Pelatihan Teknis Peternakan Masyarakat Miskin
33	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengembangan Kerjasama Kemitraan Usaha Agribisnis
34	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani-Nelayan
35	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara
36	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Komunitas Kreatif (PUSKOMKREF)
37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Fasilitasi Ijin Usaha Pembudidaya Ikan
38	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Fasilitasi Ijin Usaha Penangkapan Ikan
39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pelatihan Nelayan Kecil
40	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pelatihan Budidaya Ikan
41	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pembinaan KUB
42	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Spesifik
43	DINAS KETAHANAN PANGAN	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan
44	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Pelatihan Keahlian tenaga kerja berbasis Masyarakat
45	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengembangan dan Peningkatan Ketrampilan Kader dan anggota Kelompok UPPKS
46	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengembangan Kelompok BKB dan BKL
47	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengembangan Kelompok BKR

ASB I-17 BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI

Bimbingan atau Pelatihan Teknis bagi Pegawai adalah merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/ pelatihan kepada para pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali Belanja

- Jumlah Peserta dan Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (OH)

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 73.860.830 + (\text{Rp. } 500.240 \times X) + \text{Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir}$

Dimana :

Y = Total Belanja
X = Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)
Belanja Tetap = Rp. 73.860.830
Belanja Variabel = Rp. 500.240

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	9%	17%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	6%	13%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	2%	5%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	13%	21%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	28%	58%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0%	20%	43%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	22%	42%
Jumlah		100%	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		Seijin TAPD	5%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pelatihan fungsional dan manajerial (termasuk ESQ) berdasarkan hasil TNA untuk setiap unit dan jenis tenaga
2	INSPEKTORAT KABUPATEN	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelatihan Siaga Bencana Desa/Kelurahan
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan Pengelolaan BMD
6	DINAS SOSIAL	Peningkatan Kapasitas Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Peningkatan Kemampuan Anggota KORSIK (Korps Musik) SATPOL PP
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Berbasis Online
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pengawas TK, SD, SMP
10	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
11	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Peningkatan Mutu Penggunaan alat kesehatan
12	DINAS KESEHATAN	Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi
13	DINAS KESEHATAN	Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka konseling menyusui
14	DINAS KESEHATAN	Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka tata laksana anak gizi buruk
15	DINAS KESEHATAN	Supervisi/bimtek pengelola program PTM
16	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penyusunan dan pengembangan SP dan SOP
17	BAGIAN ORGANISASI	Character Building Manajemen Kabupaten
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	DINAS PEKERJAAN UMUM	Fasilitasi Job Fit
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelatihan CTU MKJP bagi Tenaga Medis
21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan KB di Faskes
22	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pelatihan fungsional dan manajerial (termasuk ESQ) berdasarkan hasil TNA untuk setiap unit dan jenis tenaga
23	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Pelatihan fungsional dan manajerial (termasuk ESQ) berdasarkan hasil TNA untuk setiap unit dan jenis tenaga

ASB I-18 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP DAERAH

Definisi

Forum komunikasi atau koordinasi lingkup daerah adalah merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pengendali Belanja

- Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Lama Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi (OH)

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 46.573.510 + (\text{Rp. } 751.820 \times X) + \text{Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir}$

Dimana :

- Y = Total Belanja
- X = Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)
- Belanja Tetap = Rp. 46.573.510
- Belanja Variabel = Rp. 751.820

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	15%	37%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	5%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	2%	5%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	6%	11%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	48%	82%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0%	18%	47%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	9%	17%
Jumlah		100%	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		Seijin TAPD	5%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi LKPD 2019
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD BPKAD
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan SPP SKPKD
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Keberatan, Restitusi dan Penghapusan Piutang Pajak
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi dan koordinasi penyertaan modal
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Pengelolaan Kas Daerah
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta
9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan BMD
10	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah
11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Fasilitasi Layanan Mutasi Kepegawaian
13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD
14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD
16	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Penghapusan BMD
17	SEKRETARIAT DPRD	Fasilitasi Temuan BPK dan Inspektorat
18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Koordinasi dan Konsultasi Optimalisasi DBH
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah
20	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan lain-lain
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Kabupaten
23	INSPEKTORAT KABUPATEN	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
24	INSPEKTORAT KABUPATEN	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Pendidikan
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Penguatan Kurikulum Tahun 2013 SD
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Pelaksanaan Kurikulum Tahun 2013 SMP

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rapat Koordinasi PP dan PA
29	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penguatan Pokja PUG
30	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Forum anak (Pengarutamaan Hak anak)
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sosial Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah
41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman
42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan

ASB I-19 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI INTERN OPD

Definisi

Forum komunikasi atau koordinasi internal OPD adalah merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dalam OPD itu sendiri yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pengendali Belanja

- Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Lama Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi (OH)

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 18.208.640 + (\text{Rp. } 342.865 \times X) + \text{Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber} + \text{Belanja Transportasi dan Akomodasi}$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Lama Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi (OH)

Belanja Tetap = Rp. 18.208.640

Belanja Variabel = Rp. 342.865

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	34%	57%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	9%	23%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	3%	7%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	14%	38%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	40%	90%
Jumlah		100%	
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		Seijin TAPD	11%
Belanja Transportasi dan Akomodasi		Seijin TAPD	20%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Fasilitasi organisasi kemasyarakatan
2	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Fasilitasi Partai Politik
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Fasilitasi Tim BEKIAS
4	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Fasilitasi Tim Bekias
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Fasilitasi Tim Bekias
6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Fasilitasi Tim BEKIAS
7	SEKRETARIAT DPRD	Fasilitasi Tim BEKIAS
8	INSPEKTORAT KABUPATEN	Fasilitasi Tim BEKIAS
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Fasilitasi Tim Bekias
10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Tim Bekias OPD
11	DINAS SOSIAL	Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah
12	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah
13	RSUD DAYAKU RAJA	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah
14	DINAS PERKEBUNAN	Fasilitasi Tim Bekias RB
15	SEKRETARIAT DPRD	Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D
16	SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi Pelaporan Data Rencana Aksi Nasional (RANHAM)
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah
18	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah
19	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Petugas Pengelola ASPAK Puskesmas
20	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi rapat koordinasi teknis bendahara pembantu pengeluaran dan bendahara BLUD Puskesmas (peningkatan SDM)
21	DINAS KESEHATAN	Pertemuan Koordinasi Tenaga Petugas Promosi Puskesmas
22	DINAS KESEHATAN	Pemantapan aplikasi e-PPGBM (Pecatatan & Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat)
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah
24	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Fasilitasi tim bekias
25	DINAS PARIWISATA	Fasilitasi Tim BEKIAS
26	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi TIM BEKIAS
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Tim BEKIAS
29	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Fasilitasi Tim Bekias RB
30	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pertemuan Kelompok Tani KTNA Kab.Kukar
31	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penanganan Kumuh Kelurahan Mangkurawang

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Fasilitasi Tim BEKIAS
33	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Fasilitasi Tim Bekias dan RB
34	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rapat Teknis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Lintas Sektor
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Uji Kualitas Air dan Pengambilan Sampel Produk Perikanan Budidaya
36	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rapat Koordinasi Stakeholder Utama dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan
37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Temu Kemitraan Nelayan
38	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Temu Kemitraan Pembudidaya Ikan
39	DINAS KETAHANAN PANGAN	Fasilitasi Tim BEKIAS Reformasi Birokrasi (RB)
40	DINAS KETAHANAN PANGAN	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah
41	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pemantauan dan pembinaan kelembagaan pangan segar
42	DINAS PERHUBUNGAN	Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara
43	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kegiatan MUI Kab. Kutai Kartanegara
44	BAGIAN ORGANISASI	Fasilitasi Agen Bekias Kabupaten
45	BAGIAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Fasilitas Rapat Koordinasi Singkronisasi dan Konsultasi Serta Peningkatan SDM dalam Rangka tindak lanjut Instruksi Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Assisten
46	BAGIAN PEREKONOMIAN	Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi
47	BAGIAN PEREKONOMIAN	Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Penyelesaian KUKP 2001, 2002
48	BAGIAN PEREKONOMIAN	Fasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
49	BAGIAN PEREKONOMIAN	Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Tim Kualitas Air Baku dan Air Produksi PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara
50	BAGIAN PEREKONOMIAN	Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Peredaran Pangan dan Barang Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kab. Kutai Kartanegara
51	BAGIAN PEREKONOMIAN	Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Kutai Kartanegara
52	BAGIAN PEREKONOMIAN	Fasilitasi Rapat Koordinasi Peningkatan Kelembagaan dan Mutu Produk Unggulan UKM
53	BAGIAN PEREKONOMIAN	Fasilitasi Rakor Usaha Mikro Go Online dalam rangka Pengembangan dan Penguatan Usaha di Kab. Kukar.
54	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	Koordinasi Pemanfaatan Lahan Ex. Tambang di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
55	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	Koordinasi Implementasi Regulasi (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
56	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	Koordinasi Pengembangan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
57	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Fasilitasi Tim BEKIAS
58	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Fasilitasi Tim Bekias

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
59	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Fasilitasi Tim Bekias RB
60	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
61	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah
62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Fasilitasi Tim Bekias
63	DINAS PEKERJAAN UMUM	Fasilitasi Tim Bekias
64	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Fasilitasi Tim Bekias
65	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rapat koordinasi kependudukan dan keluarga berencana
66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah
67	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah
68	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah

ASB I-20 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INTERN OPD

Definisi

Monitoring/evaluasi dan pelaporan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik.

Monitoring/evaluasi dan pelaporan dan evaluasi tersebut dalam ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan tidak melibatkan instansi lainnya.

Pengendali Belanja

- Jumlah Tim dan Lama Waktu Pengamatan (OB)
- Jumlah Objek atau Lokasi Yang Diamati

Rumusan ASB:

$Y = \text{Rp. } 19.415.065 + (\text{Rp. } 1.540.918 \times X1) + (\text{Rp. } 1.089.000 \times X2) + \text{Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber} + \text{Belanja Transportasi dan Akomodasi}$

Dimana :

- Y = Total Belanja
- X1 = Jumlah Tim dan Lama Waktu Pengamatan (OB)
- X2 = Jumlah Lokasi
- Belanja Tetap = Rp. 19.415.065
- Belanja Variabel 1 = Rp. 1.540.918
- Belanja Variabel 2 = Rp. 1.089.000

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	15%	33%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	4%	12%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	3%	5%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	8%	18%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	70%	90%
Jumlah		100%	
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		Seijin TAPD	32%
Belanja Transportasi dan Akomodasi		Seijin TAPD	11%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PERKEBUNAN	Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Fasilitasi Penetapan Pajak
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun
4	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Sewa BMD
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas
7	DINAS PERKEBUNAN	Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Monitoring dan Evaluasi Pembukuan dan Penerimaan Pendapatan Daerah
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengelolaan Benda atau Surat Berharga
10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Monitoring Penagihan dan Penyelesaian Piutang Non Pajak
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	patroli dan deteksi dini gangguan Trantibum
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan
13	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar
14	INSPEKTORAT KABUPATEN	Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara
15	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Penguasaan Tanah di Kecamatan dan Kelurahan/Desa
16	RSUD DAYAKU RAJA	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan
17	DINAS PERKEBUNAN	Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas
18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penagihan Piutang, Penyelesaian Permasalahan Pajak di Dalam dan Luar Daerah
19	INSPEKTORAT KABUPATEN	Pendampingan/Monitoring LPPD dan Pemda
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pendataan & pemetaan wilayah rawan pelanggaran Produk Hukum Daerah
21	DINAS PERKEBUNAN	Pengendalian Dampak Lingkungan dan Perlindungan Perkebunan
22	DINAS PERKEBUNAN	Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
23	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Peningkatan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga asing (NGO) di Daerah
24	DINAS PERKEBUNAN	Proteksi Tanaman Perkebunan
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Dan Pendataan Pasca Bencana
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Assistensi Pendataan PAUD dan Dikmas (Sosialisasi Aplikasi, verifikasi dan validasi data)q
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Monitoring dan evaluasi sekolah Penerima Program Indonesia Pintar jenjang SD

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
28	DINAS KESEHATAN	Pemeriksaan dan Pemusnahan obat-obatan dan makanan yang mengandung bahan berbahaya
29	DINAS KESEHATAN	Monev Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
30	DINAS KESEHATAN	Monev Program Promosi kesehatan ke Puskesmas
31	DINAS KESEHATAN	Pemantauan Garam beryodium
32	DINAS KESEHATAN	Monitoring Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
33	DINAS KESEHATAN	Pengawasan Kualitas Air Minum
34	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi sertifikasi/perijinan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan
35	DINAS KESEHATAN	Monitoring dan Evaluasi program Surveilans
36	DINAS KESEHATAN	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Puskesmas Mampu PONED
37	DINAS KESEHATAN	Evaluasi Audit Maternal, Perinatal, Neonatal, Bayi dan balita serta kesehatan ibu dan anak / KIA
38	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Audit Verbal Kematian Ibu Maternal, Bayi dan Balita
39	DINAS KESEHATAN	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Manual Rujukan
40	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Informasi kesehatan
41	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pendampingan dan monev RAT Koperasi
42	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengawasan dan penilaian koperasi
43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3
44	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan dan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET)
45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pemantauan kualitas udara
46	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Usaha/Kegiatan
47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pemantauan Kualitas air Permukaan
48	DINAS PARIWISATA	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
49	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi pasar tertib ukur
51	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Operasi Pasar dan pasar murah barang kebutuhan pokok
52	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Monitoring harga dan kesediaan stok bahan pokok
53	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengawasan standarisasi dan realisasi kapasitas IKM
54	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembinaan dan pengelolaan pasar
55	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak/Hewan

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
56	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pengendalian OPT Pada Daerah Endemis Dan Pemasarakatan PHT
57	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Fasilitasi / Pendampingan Bidang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
58	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Implementasi PPID Kab.Kukar
59	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Monitoring Kesehatan Lingkungan Budidaya Ikan
60	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Fasilitasi Tim Kelestarian Kecamatan dan POKMASWAS
61	DINAS KETAHANAN PANGAN	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan
62	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pengujian pangan segar
63	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan
64	DINAS PERHUBUNGAN	Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran Kab. Kukar
65	DINAS PERHUBUNGAN	Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
66	DINAS PERHUBUNGAN	Monitoring, Pendataan dan Inventarisir Fasilitas Lalu Lintas di Kab. Kukar
67	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Monitoring Korban Penanggulangan Bencana Alam di Kab. Kukar
68	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Verifikasi dan Validasi Data Hibah dan Bantuan Sosial Keagamaan Kab. Kutai Kartanegara
69	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Monitoring Pertanggungjawaban Laporan (LPj) Hibah dan Bantuan Sosial Keagamaan Kab. Kutai Kartanegara
70	BAGIAN PEMERINTAHAN	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan di Kecamatan dan Kelurahan
71	BAGIAN PERLENGKAPAN	Identifikasi Data serta Fisik Tanah Milik Pemkab Kutai Kartanegara di Kecamatan Pembebasan Tahun 2006-2008
72	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Coporate Sosial Responsibility (CSR)
73	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
74	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Monitoring Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Arsip SKPD/Unit Kerja
75	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Layanan Perpustakaan Keliling
76	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Survey dan Identifikasi EBT
77	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Identifikasi Potensi Air Tanah
78	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pendampingan Pembangunan Jargas
79	DINAS PEKERJAAN UMUM	Core Tim
80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemantauan Penanaman Modal
81	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengawasan Penanaman Modal dan CSR

ASB I-21 MONITORING / PENGAWASAN / PENGENDALIAN /
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN ANTAR OPD DI LINGKUP
DAERAH

Definisi

Monitoring/pengawasan/pengendalian dan pemantauan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik.

Monitoring/pengawasan/pengendalian dan pemantauan tersebut dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan melibatkan instansi lainnya.

Pengendali Belanja

- Jumlah Obyek atau Lokasi Yang Diamati
- Jumlah Tim dan Lama Waktu Pengamatan (OB)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 97.024.285 + (\text{Rp. } 1.389.405 \times X1) + (\text{Rp. } 1.125.940 \times X2)$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X1 = Jumlah Tim dan Lama Waktu Pengamatan (OB)

X2 = Jumlah Lokasi Yang Diamati

Belanja Tetap = Rp. 97.024.285

Belanja Variabel 1 = Rp. 1.389.405

Belanja Variabel 2 = Rp. 1.125.940

Alokasi Obyek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	27%	84%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	4%	8%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	4%	6%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	15%	33%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	50%	88%
Jumlah		100%	

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	INSPEKTORAT KABUPATEN	Evaluasi Zona Intergritas
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Fasilitasi Pengamanan Tempat dan Acara Penting Daerah
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Groundcheck Hotspot Dan atau Informasi Kebakaran
6	INSPEKTORAT KABUPATEN	Implementasi SPIP dan Maturitas SPIP
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Lahan Dan Hutan
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Patroli, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pengawasan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengembangan dan Peningkatan Perangkat Jaringan TIK
12	BAGIAN PEMBANGUNAN	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
13	BAGIAN PEMERINTAHAN	Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara

ASB I-22 PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Definisi

Penyusunan dokumen berbentuk Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan usulan dari masing-masing OPD berdasarkan kebutuhan dari Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan analisa. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh OPD dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.

Pengendali Belanja

- Jumlah Tim Penyusunan Dokumen dan Lama Waktu Penyusunan Dokumen (OB)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 57.901.800 + (\text{Rp. } 799.100 \times X) + \text{Belanja Perjalanan Dinas}$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Jumlah Tim dan Lama Waktu Penyusunan (OB)

Belanja Tetap = Rp. 57.901.800

Belanja Variabel = Rp. 799.100

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	30%	35%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	6%	9%
Belanja Jasa Kantor	0%	12%	15%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	11%	29%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	10%	18%
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	0%	31%	46%
JUMLAH		100%	
Belanja Perjalanan Dinas	Disesuaikan dengan Kebutuhan		

ASB I-23 PENYUSUNAN DOKUMEN

Definisi

Penyusunan dokumen dalam ASB ini adalah berdasarkan usulan dari masing-masing OPD berdasarkan kebutuhan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan analisa. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh OPD dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.

Pengendali Belanja

- Jumlah Pegawai Yang Menyusun Dokumen dan Tahapan Penyusunan Dokumen (OTK)
- Jumlah Dokumen yang dihasilkan/digandakan

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 37.529.490 + (\text{Rp. } 1.914.620 \times X1) + (\text{Rp. } 648.980 \times X2) + \text{Belanja Jasa Kantor}$

Dimana :

Y = Total Belanja

X1 = Jumlah Pegawai Yang Menyusun Dokumen dan Tahapan Penyusunan Dokumen (OTK)

X2 = Jumlah Dokumen yang dihasilkan/digandakan

Belanja Tetap = Rp. 37.529.490

Belanja Variabel 1 = Rp. 1.914.620

Belanja Variabel 2 = Rp. 648.980

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	15%	27%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	7%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	4%	11%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	5%	11%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	30%	66%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0%	25%	42%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	19%	42%
Jumlah		100%	
Belanja Jasa Kantor		Seijin TAPD	21%

Data Yang Dianalisis:

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Pengembangan data dan informasi
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Analisis Kebutuhan Diklat
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Analisis Kebutuhan Pegawai
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Analisis Kesenjangan Kompetensi ASN
5	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Fasilitasi Pengembangan Karier dan Promosi
8	RSUD DAYAKU RAJA	Fasilitasi Peningkatan Akreditasi RSUD Dayaku Raja
9	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan, Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Grand Design Pengembangan Aparatur Kab. Kutai Kartanegara
11	DINAS PERKEBUNAN	Identifikasi Penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT) Tanaman Aren dan Pohon Induk Terpilih (PIT)
12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Inventarisasi Barang Milik Daerah
13	SEKRETARIAT DPRD	Inventarisasi Barang Milik Daerah
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Inventarisasi Barang Milik Daerah
15	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Inventarisasi Barang Milik Daerah
16	SEKRETARIAT DP. KORPRI	Inventarisasi Barang Milik Daerah
17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Inventarisasi tanaman padi spesifik lokal sebagai sumber plasma nuftah di Kutai Kartanegara
18	INSPEKTORAT KABUPATEN	Inventarisasi temuan pengawasan dan Distribusi LHP
19	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kajian Ekonomi Masyarakat di Sekitar dan di Dalam Kawasan Rencana Taman Hutan Raya Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara
20	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kajian inovatif pengembangan kelembagaan usaha masyarakat dalam rangka mendukung revolusi jagung Kabupaten Kutai Kartanegara
21	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	Kajian Pemukiman Diatas Air kabupaten Kutai Kartanegara
22	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kajian Penelusuran Sejarah Kerajaan Kutai Mulawarman
23	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kajian Sistem Tataniaga pemasaran Komoditi Jagung dan padi

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kajian Sosial dan Budaya Masyarakat di Sekitar dan di Dalam Kawasan Rencana Taman Hutan Raya Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara
25	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kajian Teknis Pembentukan Kawasan Taman Hutan Raya Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara
26	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kajian tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan dan toko modern
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD
28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
30	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengarsipan bantuan keuangan hibah, bansos, subsidi alokasi dana desa
31	INSPEKTORAT KABUPATEN	Pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengelolaan Absensi Elektronik dilingkungan Pemkab Kukar
33	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan P2
34	DINAS SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
35	DINAS PERKEBUNAN	Penyusunan Data Dan Informasi
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
38	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara
39	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan Masterplan (Road Map) Pendapatan Daerah
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyusunan Pengembangan Karier dan Promosi
41	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD se Kab. Kukar
42	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penyusunan Target Pendapatan
43	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala
44	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang Pendapatan Daerah
45	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rekonsiliasi Penganggaran Daerah
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN Kab. Kutai Kartanegara
47	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Resurvey akreditasi dari KARS
48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Riset Cepat Tentang Isu Strategis dan Isu Aktual
49	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sinkronisasi Data BMD

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
50	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Studi Kelayakan Naskah Akademik Persiapan Kabupaten Kutai Tengah
51	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kab.kutai kartanegara
52	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) di kab.kutai kartanegara
53	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Validasi dan Konfirmasi Data Penerimaan PAD Pada Bendahara Penerimaan
54	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelestarian cagar budaya Kab. Kutai Kartanegara
55	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan bahan ajar Muatan lokal Bahasa Kutai
56	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi dan validasi data SD penerima Bantuan
57	DINAS KESEHATAN	Manajemen Pengelolaan dan Inventaris Aset Kesehatan
58	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi surveylance ISO Dinkes
59	DINAS KESEHATAN	Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan
60	DINAS KESEHATAN	Surveilans aktif petugas Kabupaten ke RSUD, BPS
61	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
62	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Fasilitasi Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)
63	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Penilaian Kwartir Ranting Tergiat
64	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pengembangan data dan informasi koperasi UKM.
65	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pendataan Peran Serta Gender pada Koperasi dan Usaha Mikro
66	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penyusunan Profil DLHK
67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah
68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pengendalian kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa
69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah, Provinsi dan Pusat
70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
71	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pengolahan Data Informasi DLHK
73	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten
74	DINAS PARIWISATA	Pemetaan pasar pariwisata
75	DINAS PARIWISATA	Pengembangan Statistik Kepariwisata
76	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat
77	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dan Profil Desa
78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemetaan Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak Kab. Kutai Kartanegara

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
79	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penyusunan Data Terpilah Gender
80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan Profil Perindustrian dan Perdagangan
81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan Neraca Perdagangan
82	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perencanaan Sistem Resi Gudang (SRG)
83	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Analisis rantai nilai kebutuhan komoditi jagung
84	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyusunan HSPK Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman
85	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
86	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
87	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (Inovasi Data Kukar)
88	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA)
89	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	Integrasi Data Layanan
90	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penyusunan Data dan Informasi Perikanan
91	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Evaluasi Pemanfaatan TPI Semangkok
92	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
93	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)
94	DINAS KETAHANAN PANGAN	pemantauan dan analisis infrastruktur dan pendukung pangan
95	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pendampingan APBN dan Sumber Dana APBD Provinsi
96	DINAS PERHUBUNGAN	Pengembangan Data dan Informasi
97	BAGIAN HUKUM	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)
98	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Data Bantuan Korban Penanggulangan Bencana di Kab. Kukar
99	BAGIAN ORGANISASI	Evaluasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
100	BAGIAN ORGANISASI	Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
101	BAGIAN ORGANISASI	Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Kecamatan
102	BAGIAN ORGANISASI	Evaluasi Kelembagaan dan Tata Kerja Dinas & Badan
103	BAGIAN ORGANISASI	Penyusunan LKJIP dan PK Sekretariat Daerah dan Kabupaten
104	BAGIAN ORGANISASI	Evaluasi SP, Tata Naskah Dinas dan Pola Koordinasi
105	BAGIAN PEMBANGUNAN	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bankeu, DAK, CSR, APBD dan APBN di Kab. Kukar
106	BAGIAN PEMERINTAHAN	Penyusunan LPPD OPD Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
107	BAGIAN PERLENGKAPAN	Inventarisasi Barang Milik Daerah

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
108	BAGIAN PERLENGKAPAN	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
109	BAGIAN PERLENGKAPAN	Fasilitasi Penatausahaan Penghapusan BMD Lingkup Setkab Kutai Kartanegara
110	BAGIAN PERLENGKAPAN	Fasilitasi Penelusuran serta pemutahiran data Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2 lingkup Setkab Kutai Kartanegara.
111	BAGIAN PERLENGKAPAN	Fasilitasi Penataan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas 4 dan 2 milik Setkab Kutai Kartanegara
112	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	Evaluasi Implementasi Regulasi (Perda/Perbup) bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan
113	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pemutakhiran dan Pengolahan Data Penduduk
114	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pengembangan Data Base Kependudukan
115	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Inventarisasi Data Rumah Tangga Berlistrik
116	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Inventarisasi LPJU
117	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Rancang Kapling
118	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Pendataan tenaga kerja informal dan formal
119	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Database Perizinan
120	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
121	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelolaan data dan informasi program Pengendalian Penduduk dan KB tingkat Kabupaten
122	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
123	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Inventarisasi Barang Milik Daerah
124	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Resurvey akreditasi dari KARS
125	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
126	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Inventarisasi Barang Milik Daerah
127	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	<i>Resurvey</i> akreditasi dari KARS

ASB I-24 SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

Definisi

Kegiatan Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, keahlian, pemahaman, tujuan, tindakan dan kepercayaan. (*Extension may be defined as the science of making people innovative for sustainable improvement in their quality of live, Ray, 1998*).

Kegiatan sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada kelompok atau masyarakat.

Pengendali Belanja

- Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)

Rumusan ASB:

$Y = \text{Rp. } 87.218.780 + (\text{Rp. } 286.375 \times X) + \text{Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir}$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Jumlah Peserta Sosialisasi/ Penyuluhan dan Jumlah Hari (OH)

Belanja Tetap = Rp. 87.218.780

Belanja Variabel = Rp. 286.375

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	7%	14%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	11%	28%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	2%	4%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	15%	44%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	29%	66%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0%	15%	35%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	21%	54%
Jumlah		100%	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Seijin TAPD		3%

Data Yang Di Analisis:

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kampanye Pengendalian Karhutla Melalui Kegiatan di Sekolah
2	DINAS PERKEBUNAN	Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (Perkebunan)
3	DINAS SOSIAL	Pembentukan Kampung Siaga Bencana
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial
5	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di bidang Sosial Budaya
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Sosialisasi 11 Jenis Pajak Daerah
7	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme
8	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	sosialisasi dan promosi pelayanan kesehatan masyarakat
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Seminar dan Diskusi Pendidikan
10	DINAS KESEHATAN	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Sosialisasi Pemuda Cinta Damai Lintas Agama
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Pembudayaan Olahraga
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Sosialisasi Pemahaman Koperasi
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Fasilitasi program Nasional Adipura
15	DINAS PARIWISATA	Sosialisasi TDUP
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Sosialisasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sosialisasi masalah sosial anak
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan (Jabatan Politik)
19	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Kegiatan Penyuluh Pertanian
20	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Sosialisasi program pengembangan "Revolusi" Jagung
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sosialisasi Pengendalian SDI
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sosialisasi PP No.4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sosialisasi dan Pendataan Kartu KUSUKA
24	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pengembangan Pangan Lokal
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Sosialisasi Pemanfaatan Panas Bumi
27	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Sosialisasi dan pemahaman peraturan pemerintah (PP No. 3 Tahun 2014 tentang ketransmigrasian
28	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	sosialisasi dan promosi pelayanan kesehatan masyarakat
29	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	sosialisasi dan promosi pelayanan kesehatan masyarakat

ASB I-25 SOSIALISASI KEPADA PEGAWAI

Definisi

Kegiatan Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, keahlian, pemahaman, tujuan, tindakan dan kepercayaan. (*Extension may be defined as the science of making people innovative for sustainable improvement in their quality of live, Ray, 1998*).

Kegiatan sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada pegawai dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengendali Belanja

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 15.086.465 + (\text{Rp. } 596.710 X)$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Hari (OH)

Belanja Tetap = Rp. 15.086.465

Belanja Variabel = Rp. 596.710

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	14%	27%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	4%	8%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	3%	6%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	10%	14%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	35%	80%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0%	19%	25%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	15%	23%
Jumlah		100%	

Data Yang Dianalisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	SEKRETARIAT DP. KORPRI	Fasilitasi Sosialisasi LKBH
2	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Pembinaan Ideologi Karakter dan Wasbang
3	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan
4	DINAS KESEHATAN	Workshop Akreditasi Puskesmas
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Sosialisasi perturan perundang-undangan
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Implementasi dan Sosialisasi Aplikasi LPSE
7	BAGIAN PERLENGKAPAN	Sosialisasi Analisa Standar Belanja (ASB) & Standar Biaya dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

ASB I-26 KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

Definisi

Kegiatan ini merupakan perlombaan yang dilakukan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan kriteria umum yang biasa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan golongan.

Pengendali Belanja

- Jenis/Kategori Perlombaan
- Jumlah Peserta Lomba

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 60.114.420 + (\text{Rp. } 3.868.450 \times X1) + (\text{Rp. } 756.020 \times X2) + \text{Belanja Jasa Kantor} + \text{Belanja Sewa Mobilitas} + \text{Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu} + \text{Belanja Perjalanan Dinas}$

Dimana :

- Y = Total Belanja
 X1 = Jenis atau Kategori Perlombaan
 X2 = Jumlah Peserta Lomba
 Belanja Tetap = Rp. 60.114.420
 Belanja Variabel 1 = Rp. 3.868.450
 Belanja Variabel 2 = Rp. 756.020

Alokasi objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	10%	36%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	7%	14%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	4%	15%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0%	4%	8%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	15%	28%
Belanja Penghargaan/ Hadiah	0%	12%	23%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0%	9%	19%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	39%	45%
Jumlah		100%	
Belanja Jasa Kantor	Seijin TAPD		12,93%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Seijin TAPD		3,16%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Seijin TAPD		3,02%
Belanja Perjalanan Dinas	Seijin TAPD		16,22%

ASB I-27 KEGIATAN YANG BERSIFAT FESTIVAL ATAU PAMERAN

Definisi

Mengikuti pameran adalah kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk berpartisipasi dalam menampilkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali Belanja

- Jumlah Stand
- Jumlah Tim dan Hari Pameran (OH)

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 35.100.000 + (\text{Rp. } 21.926.100 \times X1) + (\text{Rp. } 30.500 \times X2) + \text{Belanja Perjalanan Dinas}$

Dimana :

Y = Total belanja
 X1 = Jumlah Stand
 X2 = Jumlah Hari Pameran
 Belanja Tetap = Rp. 35.100.000,-
 Belanja Variabel 1 = Rp. 21.926.100,-
 Belanja Variabel 2 = Rp. 30.500,-

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	5%	7%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	9%	20%
Belanja Bahan Material	0%	4%	10%
Belanja Jasa Kantor	0%	34%	39%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	1%	3%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0%	6%	13%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0%	3%	4%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0%	12%	26%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	7%	20%
Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Lainnya	0%	5%	10%
Belanja Penghargaan/Hadiah	0%	11%	23%
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	0%	3%	5%
Jumlah		100%	
Belanja Perjalanan Dinas	Disesuaikan dengan Kebutuhan		

ASB I-28 ADMINISTRASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ATAU PENYUSUNAN APLIKASI

Definisi

Kegiatan Administrasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah kegiatan dalam rangka menghadirkan sistem bersifat software yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam melancarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Penyusunan sistem Informasi

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 57.530.675 + (0,181 X) + \text{Belanja Modal (Nilai Belanja Penyusunan Sistem Informasi/Aplikasi)}$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Nilai Belanja Penyusunan Sistem Informasi/Aplikasi

Belanja Tetap = Rp. 57.530.675

Belanja Variabel = 0.181

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	12%	36%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	2%
Belanja Jasa Kantor	0%	46%	78%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	5%	13%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	7%	16%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	28%	61%
Jumlah		100%	
Nilai Belanja Penyusunan Sistem Informasi/Aplikasi (Belanja Modal)			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pembuatan Aplikasi Barang Persediaan BMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pemutakhiran dan Penyediaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Berbasis Online
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja berbasis Web
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penguatan Perpustakaan E-Library
6	SEKRETARIAT DPRD	Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan portal PPDB Online
8	DINAS PARIWISATA	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan TIC
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengembangan Smart Info
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Implementasi Smart Regency/ City
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Informasi (Aplikasi)
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengembangan dan Peningkatan Akselerasi SIMRAL Pada NOC
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengembangan dan Peningkatan Data Center
14	DINAS PERHUBUNGAN	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)
15	DINAS PEKERJAAN UMUM	OP Bidang Teknis

ASB I-29 ADMINISTRASI PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI ATAU APLIKASI

Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan memelihara sistem informasi atau aplikasi yang telah ada agar selalu ter up-date sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini dilakukan agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas keseharian kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Pemeliharaan Sistem

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 50.628.010 + (0,023 X) + \text{Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber} + \text{Belanja Transportasi dan Akomodasi}$

Dimana :

Y = Total Belanja
 X = Nilai Belanja Pemeliharaan Sistem
 Belanja Tetap = Rp. 50.628.010
 Belanja Variabel = 0,023

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	30%	61%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	4%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	5%	7%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	9%	16%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	54%	77%
Jumlah		100%	
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Seijin TAPD		8%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	Seijin TAPD		32%
Belanja Pemeliharaan Sistem	Dianggarkan Sesuai Kebutuhan		

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<i>Upgrading</i> Aplikasi Simpedu Dinas
2	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan peralatan pendukung sistem informasi kesehatan di dinkes kabupaten, puskesmas dan jaringannya
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<i>Penetration Testing</i> (Pentes) Aplikasi dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan

ASB I-30 PEMELIHARAAN *WEB DESIGN* (PENAMBAHAN ATAU UPDATE HALAMAN WEB)

Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan memelihara laman web yang telah dimiliki oleh OPD agar selalu ter up-date sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru dari OPD pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengendali Belanja

- Jumlah Tim Pemeliharaan dan Lama Waktu (OB)

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 14.682.470 + (\text{Rp. } 1.120.910 \times X) + \text{Belanja Perjalanan Dinas} + \text{Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber}$

Dimana :

Y = Total Belanja
 X = Jumlah Tim Pemeliharaan Web dan Lama Waktu (OB)
 Belanja Tetap = Rp. 14.682.470
 Belanja Variabel = Rp. 1.120.910

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	55%	89%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	5%	14%
Belanja Jasa Kantor	0%	33%	66%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	3%	4%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	4%	7%
Jumlah		100%	
Belanja Perjalanan Dinas	Seijin TAPD		21%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Seijin TAPD		14%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan <i>Website</i>
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengelolaan <i>Website</i> BPBD
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengelolaan <i>Website</i> BPKAD
4	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Pengelolaan <i>Website</i> Dinas Kesehatan & Puskesmas
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengelolaan <i>Website</i>
6	BAGIAN HUKUM	Pengelolaan <i>Website</i> Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Bagian Administrasi Hukum
7	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Halaman <i>Website</i> Humas dan Protokol

ASB I-31 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

Definisi

Penyelenggaraan operasional kesehatan bagi masyarakat adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit tertentu yang diderita oleh orang-orang namun hanya untuk memberikan bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan Organisasi Perangkat Daerah .

Pengendali Belanja

- Jumlah Masyarakat Yang Dilayani

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 19.994.200 + (\text{Rp. } 1.747.310 \times X) + \text{Belanja Jasa Kantor}$$

Dimana :

- Y = Total Belanja
- X = Jumlah Masyarakat Yang Dilayani
- Belanja Tetap = Rp. 19.994.200
- Belanja Variabel = Rp. 1.747.310

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	2%	4%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	6%
Belanja Bahan Material	0%	40%	80%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	4%	6%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0%	6%	14%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	30%	57%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	10%	32%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0%	4%	9%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	2%	4%
Jumlah		100%	
Belanja Jasa Kantor	Seijin TAPD		10%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS KESEHATAN	Vasilitasi momen-momen tertentu/kejadian tertentu
2	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
3	DINAS KESEHATAN	Tes Kebugaran Jemaah haji
4	DINAS KESEHATAN	Pencegahan dan Penanggulangan Ibu Hamil KEK dan anak gizi buruk /KEP
5	DINAS KESEHATAN	Penyediaan makanan Tambahan pada anak Sekolah
6	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Percepatan Program ASI Eksklusif
7	DINAS KESEHATAN	Pemeriksaan Cholinesterase darah petani dan pekerja
8	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit DBD
9	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Malaria
10	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit HIV - AIDS
11	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit TB
12	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Kusta
13	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Menular
14	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
15	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Peningkatan Cakupan Imunisasi
16	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) Penyakit Menular
17	DINAS KESEHATAN	Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit PD3I
18	DINAS KESEHATAN	Penjaringan dan pelacakan kasus AFP
19	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi surveilan epidemiologi dan Penyelidikan Epidemiologi (Penyakit Menular, tdk menular, keracunan makanan dll)
20	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Penanggulangan Penyakit tidak Menular
21	DINAS KESEHATAN	Program Kesehatan Jiwa
22	DINAS KESEHATAN	Program Kesehatan Indra
23	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi penanggulangan Wabah KLB
24	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi penanggulangan Bencana
25	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Pengembangan Nikah Sehat
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan KB
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi Tim KB Keliling (TKBK) Kecamatan ke Desa

ASB I-32 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT (OPERASIONAL PUSKESMAS)

Definisi

Penyelenggaraan operasional kesehatan bagi masyarakat (Operasional Puskesmas) adalah merupakan kegiatan operasional sehari-hari bagi puskesmas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Pengendali Belanja

- Jumlah Masyarakat Yang Dilayani

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 100.534.970 + (\text{Rp. } 7.620 \times X) + \text{Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber} + \text{Belanja Transportasi dan Akomodasi}$$

Dimana :

- Y = Total Belanja
- X = Jumlah Masyarakat Yang Dilayani
- Belanja Tetap = Rp. 100.534.970
- Belanja Variabel = Rp. 7.620

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	12%	16%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	11%	19%
Belanja Bahan/Material	0%	8%	16%
Belanja Jasa Kantor	0%	22%	33%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0%	9%	15%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	2%	5%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	4%	7%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	32%	48%
Jumlah		100%	
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		Seijin TAPD	13%
Belanja Transportasi dan Akomodasi		Seijin TAPD	10%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bunga Jadi
2	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Prangat
3	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Badak Baru
4	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rimba Ayu
5	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jonggon Jaya
6	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Badak
7	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Duri
8	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rapak Mahang
9	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sanga-Sanga
10	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Kaman
11	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Marang Kayu
12	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kahala
13	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ritan
14	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Wis
15	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungai Meriam
16	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Kulu
17	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Muntai
18	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mangkurawang
19	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batuah
20	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tabang
21	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Jawa
22	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Teluk Dalam
23	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Ipuh
24	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Handil Baru
25	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota Bangun
26	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Separi 3
27	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Loa Janan
28	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sebulu 2
29	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Samboja
30	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kembang Janggut

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
31	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Merdeka
32	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sebulu 1
33	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jantur
34	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Pantuan

ASB I-33 REHABILITASI LAHAN PERTANIAN (MINIMAL LUAS TANAH 2 Ha)

Definisi

Rehabilitasi lahan untuk tanaman memiliki pengertian kegiatan untuk merehab lahan yang telah digunakan untuk tanaman. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberdayakan lahan yang telah digunakan sebelumnya bukan pada jenis tanaman tertentu.

Pengendali Belanja

- Jumlah Luasan Lahan (Ha) yang akan direhabilitasi

Keterangan : ASB ini digunakan dengan Minimal 2 Ha tanah yang akan direhabilitasi

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 95.573.215 + (\text{Rp. } 14.215.550 \times X) + \text{Belanja Bahan/Material}$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Luas Lahan Yang Akan Di Rehabilitasi (Hektar)

Belanja Tetap = Rp. 95.573.215

Belanja Variabel = Rp. 14.215.550

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	2%	3%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	1%	2%
Belanja Jasa Kantor	0%	85%	98%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	1%	2%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	11%	20%
Jumlah		100%	
Belanja Bahan/Material	Seijin TAPD		9%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS PERKEBUNAN	Pengembangan Komoditi Kebun Dinas
2	DINAS PERKEBUNAN	Rehab/Peremajaan Tanaman Karet Rakyat
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penanaman Bambu Di Kanan Kiri Sungai
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Penanaman Di Kawasan Mangrove

ASB I-34 ADMINISTRASI PENYEBARLUASAN INFORMASI ATAU PUBLIKASI ATAU PROMOS

Definisi

Kegiatan Promosi / publikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan layanan berupa promosi atau publikasi kepada masyarakat secara luas, dimana masyarakat bukan hanya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi secara luas pada umumnya melingkupi seluruh masyarakat Indonesia.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Publikasi

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 78.443.445 + (0,002 X) + \text{Nilai Belanja Publikasi}$$

Dimana :

- Y = Total Belanja
X = Nilai Belanja Publikasi
Belanja Tetap = Rp. 78.443.445
Belanja Variabel = 0,002

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	20%	40%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	7%
Belanja Jasa Kantor	0%	27%	65%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	2%	5%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0%	27%	54%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	2%	4%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	20%	44%
Jumlah		100%	
Belanja Publikasi			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penerbitan Buletin dan Jurnal ilmiah Sebagai Media Komunikasi
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Informasi dan Publikasi
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan
4	DINAS KESEHATAN	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
5	DINAS KESEHATAN	Kebijakan dan manajemen kesehatan dan fasilitasi Kewhumasan bidang kesehatan
6	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Publikasi Kinerja Pembangunan pada Event Pembangunan Daerah
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Publikasi Event Daerah Melalui Media Cetak dan Online
8	DINAS PARIWISATA	Pelaksanaan Promosi Pariwisata
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Promosi Produk (Dekranasda) Kabupaten Kutai Kartanegara
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Partisipasi Promosi Produk Industri dan Dagang
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Publikasi Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pembinaan POKDAKAN
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pengembangan media informasi keamanan pangan
14	BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI PUBLIK DAN	Pengelolaan Data dan Informasi Daerah
15	BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI PUBLIK DAN	Pameran Pembangunan Merah Putih Sanga-sanga dan Pawai Pembangunan
16	BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI PUBLIK DAN	Pengelolaan TV Kabel dan Peremajaan Jaringan TV Kabel
17	BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI PUBLIK DAN	Pengelolaan Informasi melalui Media Cetak dan Media Display Informasi
18	BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI PUBLIK DAN	Publikasi Event Daerah melalui Media Cetak dan Online
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyajian Informasi Kependudukan
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk

ASB I-35 PEMBUKAAN LAHAN BARU UNTUK TANAMAN (MINIMAL LUAS TANAH 10 Ha)

Definisi

Pembukaan lahan baru untuk tanaman memiliki pengertian kegiatan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk tanaman. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberdayakan lahan yang belum bermanfaat menjadi lebih bermanfaat untuk di tanami. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan selesainya proses tanam dan pengawasannya serta diterbitkannya pertanggungjawaban laporan hasil kegiatan.

Pengendali Belanja

- Jumlah Luasan Lahan (Ha)

Keterangan : ASB ini digunakan dengan Minimal 10 Ha tanah yang akan direhabilitasi

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 232.038.240 + (\text{Rp. } 11.656.995 \times X)$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Jumlah Luasan Lahan (Ha)

Belanja Tetap = Rp. 232.038.240

Belanja Variabel = Rp. 11.656.995

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	5%	7%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	1%	2%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	14%	24%
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0%	80%	98%
JUMLAH		100%	

ASB I-36 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

Definisi

Penyusunan Peraturan Bupati merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun peraturan kepala daerah, Aktivitas ini terhitung setelah adanya bahan pembahasan dan mulai dibahasnya bahan sampai menjadi peraturan Bupati.

Pengendali Belanja

- Jumlah Pegawai Yang Menyusun dan Tahapan Kegiatan (OTK)
- Jumlah Dokumen Yang Diperbanyak (Buku)

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp } 2.158.190 + (\text{Rp. } 1.091.510 \times X1) + (\text{Rp. } 401.700 \times X2) + \text{Belanja Perjalanan Dinas}$

Dimana :

Y = Total Belanja

X1 = Jumlah Pegawai Yang Menyusun dan Tahapan Kegiatan (OTK)

X2 = Jumlah Dokumen Yang Diperbanyak (Buku)

Belanja Tetap = Rp. 2.158.190

Belanja Variabel 1 = Rp. 1.091.510

Belanja Variabel 2 = Rp. 401.700

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	31%	52%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	2%	6%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	11%	23%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	12%	22%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0%	30%	51%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	14%	18%
Jumlah		100%	
Belanja Perjalanan Dinas		Seijin TAPD	40,63%

ASB I-37 PENANGANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Definisi

Penanganan Administrasi Kepegawaian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terhadap segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian.

Pengendali Belanja

- Jumlah Pegawai (PNS)

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 60.926.400 + (\text{Rp. } 104.700 \times X) + \text{Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber}$

Dimana :

Y = Total Belanja
X = Jumlah Pegawai (PNS)
Belanja Tetap = Rp. 60.926.400
Belanja Variabel = Rp. 104.700

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	22%	47%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	3%	5%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	7%	12%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	4%	7%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	64%	78%
Jumlah		100%	
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		Seijin TAPD	24%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Proses layanan Usul KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN bagi PNS dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah PNS
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)
6	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Kepangkatan dan Jabatab JFT
7	BAGIAN ORGANISASI	Fasilitasi LHKPN Kabupaten
8	BAGIAN UMUM	Manajemen Tata Kearsipan Dokumen ASN Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
9	BAGIAN UMUM	Fasilitasi Pengelolaan Dan Validasi Data Kehadiran ASN Pada 12 Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

ASB I-38 FASILITASI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Definisi

Fasilitasi dapat dijelaskan dengan banyak cara.

Beberapa definisi yang sering dipakai adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi adalah memungkinkan atau menjadikan lebih mudah.
2. Fasilitasi adalah mendorong masyarakat membantu dirinya dengan cara hadir bersama mereka, mendengarkan mereka, dan menanggapi kebutuhan mereka.
3. Fasilitasi adalah mendukung individu, kelompok atau organisasi melalui proses-proses partisipasi.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi berupa pelayanan secara langsung kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengendali Belanja

- Jumlah Masyarakat Yang Di Layani

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 42.415.780 + (\text{Rp. } 23.290 \times X) + \text{Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber} + \text{Belanja Transportasi dan Akomodasi}$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Jumlah Masyarakat Yang Di Layani

Belanja Tetap = Rp. 42.415.780

Belanja Variabel = Rp. 23.290

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	12%	19%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	9%	37%
Belanja Jasa Kantor	0%	24%	38%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	6%	17%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	3%	6%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	46%	78%
Jumlah		100%	
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		Seijin TAPD	11%
Belanja Transportasi dan Akomodasi		Seijin TAPD	15%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	DINAS SOSIAL	Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyelenggaraan Sumpah janji PNS
3	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam
4	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pendampingan Penerbitan IUMK
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan perizinan air limbah
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT dan halal)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Operasional Pelayanan KTP Elektronik
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kematian
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kembang Janggut
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kota Bangun
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Jawa
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Badak
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

II. ASB PADA KECAMATAN

ASB II-01 PENDAMPINGAN ATAU PEMBINAAN ATAU FASILITASI

Definisi

Pembinaan/Fasilitasi/Pendampingan berdasarkan jumlah peserta adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap suatu topik tertentu. Pembinaan merupakan upaya untuk memberikan pengarahan atau bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan pada bidang yang dibina. Pembinaan lebih menekankan pada pendekatan yang praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Dengan definisi lain pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subyek dengan tindakan pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan (Poerwadarminta, 1987).

Pengendali Belanja

- Jumlah Peserta Yang di dampingi/fasilitasi/Bimbing

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 596.075 + (\text{Rp. } 5.536.150 \times X) + \text{Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu} + \text{Belanja Penghargaan/ Hadiah} + \text{Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber} + \text{Belanja Transportasi dan Akomodasi}$

Dimana :

Y = Total belanja

X = Jumlah Peserta Yang di dampingi/fasilitasi/Bimbing

Belanja Tetap = Rp. 596.075

Belanja Variabel = Rp. 5.536.150

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	2%	5%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	1%	4%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	1%	3%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	1%	4%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	1%	3%
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0%	8%	19%
Honorarium/Operasional Pengurus lembaga Kemasyarakatan	0%	86%	98%
Jumlah		100%	
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Seijin TAPD		5%
Belanja Penghargaan/ Hadiah	Seijin TAPD		1%
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Seijin TAPD		1%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	Seijin TAPD		1%

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	KECAMATAN TENGGARONG	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
2	KECAMATAN TENGGARONG	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
3	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Fasilitasi Linmas
4	KECAMATAN TABANG	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
5	KECAMATAN TABANG	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
6	KECAMATAN SEBULU	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
7	KECAMATAN SEBULU	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
8	KECAMATAN SANGA-SANGA	Fasilitasi/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan Tingkat
9	KECAMATAN SANGA-SANGA	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
10	KECAMATAN SAMBOJA	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
11	KECAMATAN SAMBOJA	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
12	KECAMATAN MUARA WIS	Fasilitasi Linmas
13	KECAMATAN MUARA KAMAN	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
14	KECAMATAN MUARA KAMAN	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
15	KECAMATAN MUARA JAWA	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
16	KECAMATAN MUARA JAWA	Fasilitasi Pelayanan Linmas
17	KECAMATAN MUARA BADAQ	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
18	KECAMATAN MARANG KAYU	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
19	KECAMATAN MARANG KAYU	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
20	KECAMATAN LOA KULU	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
21	KECAMATAN LOA KULU	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
22	KECAMATAN LOA JANAN	Fasilitasi/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan Tingkat
23	KECAMATAN KOTA BANGUN	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
24	KECAMATAN KOTA BANGUN	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
25	KECAMATAN KENOHAN	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
26	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
27	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Fasilitasi lembaga organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan/ kelurahan
28	KECAMATAN ANGGANA	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
29	KECAMATAN ANGGANA	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan
30	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas
31	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Fasilitasi/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/ Kelurahan

ASB II-02 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN FISIK (BELANJA MODAL)

Definisi

Administrasi Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Fisik Kecamatan adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal yang berupa fisik yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup kegiatan ini adalah dalam wilayah kerja Kecamatan.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Modal

Rumusan ASB:

$$Y = \text{Rp. } 15.240.065 + (0,008 X) + \text{Belanja Modal}$$

Dimana :

Y = Total Belanja
X = Nilai Belanja Modal
Belanja Tetap = Rp. 15.240.065
Belanja Variabel = 0,008

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	59%	87%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	32%	75%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	9%	20%
Jumlah		100%	
Belanja Modal			

Data Kegiatan Yang dianalisis:

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	KECAMATAN TENGGARONG	Pembangunan Sarana/ Prasarana Umum
2	KECAMATAN TENGGARONG	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum
3	KECAMATAN TENGGARONG	Pembangunan Jalan Kecamatan
4	KECAMATAN TENGGARONG	Pembangunan Jembatan Kecamatan
5	KECAMATAN TENGGARONG	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
6	KECAMATAN TENGGARONG	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan
7	KECAMATAN TENGGARONG	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan
8	KECAMATAN TENGGARONG	Pembangunan Turap
9	KECAMATAN TABANG	Semenisasi Halaman Kantor Kecamatan Tabang
10	KECAMATAN TABANG	Semenisasi Halaman Rumah Jabatan Camat Tabang
11	KECAMATAN SANGA-SANGA	Pembangunan turap
12	KECAMATAN SANGA-SANGA	Pembangunan Jembatan Kecamatan
13	KECAMATAN SANGA-SANGA	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
14	KECAMATAN MUARA JAWA	Pembangunan ruang kerja Kantor Camat
15	KECAMATAN KENOHAN	Rehab Rumah Dinas Staf Kecamatan
16	KECAMATAN KENOHAN	Lanjutan Pembangunan Gapura
17	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum

ASB II-03 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN FISIK (BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT)

Definisi

Administrasi Kegiatan Pengadaan Fisik adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal yang berupa fisik yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup kegiatan ini adalah menyediakan wujud fisik bangunan yang kemudian secara langsung diserahkan kepada masyarakat.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 16.680.620 + (0,005 X)$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Nilai Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Belanja Tetap = Rp. 16.680.620

Belanja Variabel = 0,005

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	43%	75%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	57%	96%
Jumlah		100%	
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Pembangunan Sarana/ Prasarana Umum
2	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum
3	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Pembangunan Jalan Kecamatan
4	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
5	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Pemeliharaan/ Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan
6	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Pembangunan Turap
7	KECAMATAN TABANG	Pematangan Lahan Area MTQ
8	KECAMATAN TABANG	Pembebasan Lahan untuk SPAM Kecamatan Tabang
9	KECAMATAN SEBULU	Pembangunan Jembatan Kecamatan
10	KECAMATAN SEBULU	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
11	KECAMATAN SANGA-SANGA	Pembangunan Sarana/ Prasarana Umum
12	KECAMATAN SANGA-SANGA	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum
13	KECAMATAN SAMBOJA	Pembangunan Sarana/ Prasarana Umum
14	KECAMATAN SAMBOJA	Pembangunan Jembatan
15	KECAMATAN SAMBOJA	Pembangunan Jalan Kecamatan
16	KECAMATAN SAMBOJA	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
17	KECAMATAN SAMBOJA	Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan Kecamatan
18	KECAMATAN SAMBOJA	Pemeliharaan/ Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan
19	KECAMATAN SAMBOJA	Pembangunan Turap
20	KECAMATAN MUARA WIS	Pembangunan Sarana/ Prasarana Umum
21	KECAMATAN MUARA WIS	Pembangunan Jalan Kecamatan
22	KECAMATAN MUARA WIS	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
23	KECAMATAN MUARA JAWA	Pembangunan turap/talud/bronjong
24	KECAMATAN MUARA JAWA	Pembangunan Sarana/ Prasarana Umum
25	KECAMATAN MUARA JAWA	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum
26	KECAMATAN MUARA JAWA	Pembangunan Jalan Kecamatan
27	KECAMATAN MUARA JAWA	Pembangunan Jembatan Kecamatan
28	KECAMATAN MUARA JAWA	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
29	KECAMATAN MUARA JAWA	Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan Kecamatan
30	KECAMATAN MUARA JAWA	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan
31	KECAMATAN MUARA BADAK	Pembangunan Sarana/ Prasarana Umum
32	KECAMATAN MUARA BADAK	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
33	KECAMATAN MUARA BADAK	Pembangunan Turap dan Timbunan RT.04
34	KECAMATAN MARANG KAYU	Pembangunan turap/talud/bronjong
35	KECAMATAN MARANG KAYU	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
36	KECAMATAN MARANG KAYU	Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan Kecamatan
37	KECAMATAN MARANG KAYU	Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Kecamatan
38	KECAMATAN LOA JANAN	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
39	KECAMATAN KOTA BANGUN	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum
40	KECAMATAN KOTA BANGUN	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
41	KECAMATAN KOTA BANGUN	Pemeliharaan/ Peningkatan Saluran Drainase Kecamatan
42	KECAMATAN KENOHAN	Rehab Gedung serbaguna untuk pertemuan dan sarana olah raga bulu tangkis
43	KECAMATAN KENOHAN	Pembangunan Gedung paud kelompok bermain alpha mandiri

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
44	KECAMATAN KENOHAN	Pelebaran jembatan
45	KECAMATAN KENOHAN	Pengurukan jalan Desa menuju jalan proros
46	KECAMATAN KENOHAN	Peningkatan badan jalan dan pengerasan dari desa kahala ilir ke desa tuana tuha (dusun pendamaran)
47	KECAMATAN KENOHAN	Pembangunan jembatan sungai maratok
48	KECAMATAN KENOHAN	Jalan Proros Desa Semayang menuju poros belayan
49	KECAMATAN KENOHAN	Lanjutan jembatan titian ulin
50	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Umum
51	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Pembebasan Lahan untuk Relokasi Korban Longsor
52	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan
53	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan
54	KECAMATAN ANGGANA	Pembangunan Jembatan Flat Dekker Jalan Bhayangkara RT.12 Desa Sungai Merian Kec. Anggana
55	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Pembangunan Jalan Kecamatan
56	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan

ASB II-04 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL)

Definisi

Administrasi Kegiatan Pengadaan Belanja Barang adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk barang atau peralatan dan perlengkapan kantor dan bukan berbentuk bangunan yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas kesehariannya.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Modal

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. 712.480} + (0,018 X) + \text{Belanja Modal}$$

Dimana :

- Y = Total Belanja
- X = Nilai Belanja Modal
- Belanja Tetap = Rp. 712.480
- Belanja Variabel = 0,018

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	100%	100%
Jumlah		100%	
Belanja Modal			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	KECAMATAN TENGGARONG	Pengadaan Kursi, Meja, Tenda
2	KECAMATAN TENGGARONG	Pengadaan Wireless, Kipas Angin, Soundsystem
3	KECAMATAN TENGGARONG	Pengadaan Mesin Rumput dan Motor Gerobak
4	KECAMATAN TENGGARONG	Pembuatan Nama Kantor Camat
5	KECAMATAN TENGGARONG	Pengadaan Mesin Fotocopy Portable Bagian Keuangan Kecamatan Tenggarong
6	KECAMATAN TENGGARONG	Pengadaan Komputer PC dan Printer Bagian Keuangan Kecamatan Tenggarong
7	KECAMATAN TABANG	Pembuatan Sumur Bor dan Kelengkapannya di halaman Kantor Camat Tabang, Kecamatan Tabang
8	KECAMATAN SAMBOJA	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
9	KECAMATAN SAMBOJA	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
10	KECAMATAN SAMBOJA	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
11	KECAMATAN SAMBOJA	Pengadaan peralatan gedung kantor
12	KECAMATAN SAMBOJA	Pengadaan mebeleur
13	KECAMATAN MUARA WIS	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
14	KECAMATAN MUARA WIS	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15	KECAMATAN MUARA JAWA	Pengadaan peralatan gedung kantor
16	KECAMATAN MUARA JAWA	Pengadaan Mesin Rumput Kelurahan MJT Muara Jawa
17	KECAMATAN MARANG KAYU	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
18	KECAMATAN MARANG KAYU	Pengadaan mebeleur
19	KECAMATAN LOA KULU	Pengadaan peralatan gedung kantor
20	KECAMATAN ANGGANA	Pengadaan peralatan gedung kantor
21	KECAMATAN ANGGANA	Penyediaan Perangkat Cetak KTP Elektronik

ASB II-05 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Definisi

Administrasi Kegiatan Pengadaan Bahan Material adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja bahan material yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengendali Belanja

- Nilai Belanja Bahan Material

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. 744.650} + (0.01 X) + \text{Belanja Bahan Material}$$

Dimana

Y = Total Belanja

X = Nilai Belanja Pengadaan Bahan Material (Belanja Bahan Material/Belanja Jasa Pihak Ketiga/ Belanja Cetak dan Penggandaan)

Belanja Tetap = Rp. 744.650

Belanja Variabel = 0,01

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	100%	100%
Jumlah		100%	
Belanja Bahan Material			

ASB II-06 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI

Definisi

Forum komunikasi atau koordinasi untuk Kecamatan ini adalah merupakan kegiatan pertemuan dua atau lebih instansi atau lembaga yang dilaksanakan dengan maksud untuk menyamakan atau mensinkronkan berbagai topik yang dibahas. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pengendali Belanja

- Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Jumlah Hari Pelaksanaan Rakor (OH)

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 2.909.525 + (\text{Rp. } 72.325 \times X) + \text{Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber} + \text{Belanja Transportasi dan Akomodasi}$

Dimana :

Y = Total Belanja
 X = Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)
 Belanja Tetap = Rp. 2.909.525
 Belanja Variabel = Rp. 72.325

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	22%	33%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	11%	23%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	7%	15%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	40%	61%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	20%	37%
Jumlah		100%	
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Seijin TAPD		10%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	Seijin TAPD		30%

Data Kegiatan yang dianalisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	KECAMATAN TENGGARONG	Pelaksanaan MUSRENBANG
2	KECAMATAN TABANG	Pelaksanaan MUSRENBANG
3	KECAMATAN SEBULU	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan/Desa
4	KECAMATAN SANGA-SANGA	Pelaksanaan MUSRENBANG
5	KECAMATAN SAMBOJA	Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG
6	KECAMATAN MUARA KAMAN	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan/Desa
7	KECAMATAN MUARA JAWA	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan
8	KECAMATAN MUARA BADAK	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2019
9	KECAMATAN MARANG KAYU	Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG
10	KECAMATAN LOA KULU	Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG
11	KECAMATAN LOA JANAN	Pelaksanaan musyawarah pembangunan Kecamatan
12	KECAMATAN KOTA BANGUN	Pelaksanaan MUSRENBANG
13	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Pelaksanaan MUSRENBANG
14	KECAMATAN ANGGANA	Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG
15	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Pelaksanaan MUSRENBANG

ASB II-07 MONITORING / PENGAWASAN / PENGENDALIAN /
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN KECAMATAN

Definisi

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup wilayah kerja Kecamatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin dalam wilayah kerja Kecamatan. Kunjungan lapangan diperlukan dalam upaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dimaksud harus diikuti dengan adanya kunjungan ke lokasi pelaksanaan kegiatan.

Pengendali Belanja

- Jumlah Tim Pelaksana Monitoring dan Lama Waktu Pelaksanaan Monitoring (OB)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 23.122.000 + (\text{Rp. } 46.720 \times X)$$

Dimana :

- Y = Total Belanja
- X = Jumlah Tim dan Lama Waktu (OB)
- Belanja Tetap = Rp. 23.122.000
- Belanja Variabel = Rp. 46.720

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	14%	22%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	1%	2%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	1%	1%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	3%	7%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	81%	100%
Jumlah		100%	

ASB II-08 PENYUSUNAN DOKUMEN

Definisi

Penyusunan dokumen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan analisa. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengendali Belanja

- Jumlah Pegawai Yang Menyusun Dokumen dan Tahapan Penyusunan Dokumen (OTK)
- Jumlah Dokumen Yang di perbanyak (Buku)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 9.000.700 + (\text{Rp. } 650.037 \times X1) + (\text{Rp. } 305.049 \times X2)$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X 1 = Jumlah Pegawai Yang Menyusun Dokumen dan Tahapan Penyusunan Dokumen (OTK)

X 2 = Jumlah Dokumen Yang di perbanyak (Buku)

Belanja Tetap = Rp. 9.000.700

Belanja Variabel 1= Rp. 650.037

Belanja Variabel 2= Rp. 305.049

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	35%	62%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	12%	31%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	6%	14%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	9%	17%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	38%	67%
Jumlah		100%	

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	KECAMATAN TENGGARONG	Penyusunan Data Potensi Kecamatan Tenggarong
2	KECAMATAN TENGGARONG	Inventarisasi Barang Milik Daerah
3	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Penyusunan Profil Kecamatan
4	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan akhir Tahun
5	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Penyusunan renja awal/tahun
6	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Inventarisasi Barang Milik Daerah
7	KECAMATAN TABANG	Inventarisasi Barang Milik Daerah
8	KECAMATAN SANGA-SANGA	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan
9	KECAMATAN SANGA-SANGA	Inventarisasi Barang Milik Daerah
10	KECAMATAN SAMBOJA	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev
11	KECAMATAN SAMBOJA	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan
12	KECAMATAN SAMBOJA	Penyusunan Laporan Keuangan
13	KECAMATAN SAMBOJA	Penyusunan Dokumen Renstra
14	KECAMATAN SAMBOJA	Inventarisasi Barang Milik Daerah
15	KECAMATAN MUARA WIS	Inventarisasi Barang Milik Daerah
16	KECAMATAN MUARA KAMAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev
17	KECAMATAN MUARA KAMAN	Inventarisasi Barang Milik Daerah
18	KECAMATAN MUARA JAWA	Penyusunan Profil Kecamatan
19	KECAMATAN MUARA JAWA	Penyusunan Laporan Keuangan
20	KECAMATAN MUARA JAWA	Inventarisasi Barang Milik Daerah
21	KECAMATAN MUARA BADAQ	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan
22	KECAMATAN MUARA BADAQ	Penyusunan LAKIP dan LPPD
23	KECAMATAN MUARA BADAQ	Inventarisasi Barang Milik Daerah
24	KECAMATAN LOA KULU	Penyusunan Profil Kecamatan
25	KECAMATAN LOA KULU	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan akhir Tahun
26	KECAMATAN LOA KULU	Inventarisasi Barang Milik Daerah
27	KECAMATAN LOA JANAN	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
28	KECAMATAN LOA JANAN	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
29	KECAMATAN LOA JANAN	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan
30	KECAMATAN LOA JANAN	Inventarisasi Barang Milik Daerah
31	KECAMATAN KENOHAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev
32	KECAMATAN KENOHAN	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan
33	KECAMATAN KENOHAN	Penyusunan Laporan Keuangan
34	KECAMATAN KENOHAN	Inventarisasi Barang Milik Daerah
35	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev
36	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan
37	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Inventarisasi Barang Milik Daerah
38	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Inventarisasi Barang Milik Daerah

ASB II-09 BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS / SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT

Definisi

Bimbingan teknis /Pelatihan Teknis /Sosialisasi pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan memberikan pelatihan/sosialisasi pada masyarakat dalam rangka memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan sesuai TUPOKSI.

Pengendali Belanja

- Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 73.100 + (\text{Rp. } 241.000 \times X) + \text{Belanja Sewa Gedung}$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)

Belanja Tetap = Rp. 73.100

Belanja Variabel = Rp. 241.000

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	12%	38%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	12%	33%
Belanja Jasa Kantor	0%	39%	79%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	3%	7%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	16%	39%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	4%	10%
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	0%	14%	38%
Jumlah		100%	
Belanja Sewa Gedung	Disesuaikan dengan Kebutuhan		

**ASB II-10 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA BANGUNAN GEDUNG KANTOR
YANG BERSIFAT RINGAN**

Definisi

Pemeliharaan Rutin/Berkala pada Bangunan Gedung Kantor yang bersifat ringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mempertahankan nilai ekonomis dari bangunan tersebut.

Pengendali Belanja

- Luasan Bangunan Yang Dipelihara (m2)

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 7.623.980 + (\text{Rp. } 212.665 \times X)$$

Dimana :

Y = Total Belanja

X = Luasan Bangunan Yang Dipelihara (m2)

Belanja Tetap = Rp. 7.623.980

Belanja Variabel = Rp. 212.665

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	4%	9%
Belanja Pemeliharaan	0%	96%	100%
Jumlah		100%	

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2	KECAMATAN TABANG	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3	KECAMATAN SAMBOJA	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4	KECAMATAN SAMBOJA	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5	KECAMATAN MUARA WIS	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6	KECAMATAN MUARA KAMAN	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
7	KECAMATAN MARANG KAYU	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
8	KECAMATAN MARANG KAYU	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9	KECAMATAN LOA JANAN	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10	KECAMATAN ANGGANA	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

ASB II-11 KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

Definisi

Kegiatan ini merupakan perlombaan yang dilakukan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan kriteria umum yang biasa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan golongan.

Pengendali Belanja

- Jumlah Peserta Lomba

Rumusan ASB

$$Y = \text{Rp. } 6.800.000 + (\text{Rp. } 61.000 \times X) + \text{Belanja Sewa Sarana Mobilitas}$$

Dimana :

- Y = Total Belanja
- X = Jumlah Peserta Lomba
- Belanja Tetap = Rp. 6.800.000
- Belanja Variabel 1 = Rp. 61.000

Alokasi objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	18%	42%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	19%	54%
Belanja Jasa Kantor	0%	8%	18%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	2%	3%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	23%	39%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	2%	7%
Belanja Penghargaan/Hadiah	0%	9%	25%
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli	0%	19%	61%
Jumlah		100%	
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Disesuaikan dengan Kebutuhan		

ASB II-12 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Definisi

Kegiatan ini dimaksudkan memelihara kendaraan dinas baik operasional maupun jabatan yang berbentuk roda 4 dan roda 2 dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas keseharian kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Pengendali Belanja

- Jumlah Kendaraan Roda 4
- Jumlah Kendaraan Roda 2

Rumusan ASB

$$Y = (\text{Rp. } 18.000.302 \text{ X1}) + (\text{Rp. } 900.450 \text{ X2})$$

Dimana :

- Y = Total Belanja
X1 = Jumlah Kendaraan Roda 4
X2 = Jumlah Kendaraan Roda 2
Belanja Variabel 1 = Rp. 18.000.302
Belanja Variabel 2 = Rp. 900.450

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0%	100%	100%
Jumlah		100%	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Roda 3, Roda 6 dan Tanpa Roda)			

Data Yang Di Analisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN	
1	KECAMATAN TENGGARONG	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
2	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
3	KECAMATAN TABANG	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
4	KECAMATAN SEBULU	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
5	KECAMATAN SANGA-SANGA	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
6	KECAMATAN SAMBOJA	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
7	KECAMATAN MUARA WIS	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
8	KECAMATAN MUARA KAMAN	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
9	KECAMATAN MUARA JAWA	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
10	KECAMATAN MUARA BADAK	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
11	KECAMATAN MARANG KAYU	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
12	KECAMATAN LOA KULU	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
13	KECAMATAN KOTA BANGUN	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
14	KECAMATAN KENOHAN	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
15	KECAMATAN ANGGANA	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan
16	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Pemeliharaan	rutin/berkala mobil jabatan
17	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Pemeliharaan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan

ASB II-13 FASILITASI PELAKSANAAN MTQ

Definisi

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam mengikuti perlombaan Musabaqoh Tilawatil Quran dengan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh pihak Kecamatan.

Pengendali Belanja

- Jumlah Orang Yang di Fasilitas atau di damping

Rumusan ASB

$Y = \text{Rp. } 20.858.500 + (\text{Rp. } 864.960 \times X) + \text{Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga} + \text{Belanja Penghargaan/ Hadiah}$

Dimana :

Y = Total Belanja

X1 = Jumlah Orang Yang di Fasilitas atau di damping

Belanja Tetap = Rp. 20.858.500

Belanja Variabel 2 = Rp. 864.960

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Ideal	Nilai Maksimal
Belanja Honorarium PNS	0%	3%	6%
Belanja Bahan Pakai Habis	0%	3%	7%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0%	12%	16%
Belanja Makanan dan Minuman	0%	12%	25%
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0%	23%	37%
Belanja Perjalanan Dinas	0%	25%	57%
Belanja Transportasi dan Akomodasi	0%	22%	40%
Jumlah		100%	
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		Seijin TAPD	4%
Belanja Penghargaan/ Hadiah		Seijin TAPD	52%

Data Yang Dianalisis

NO	NAMA SKPD	NAMA KEGIATAN
1	KECAMATAN TENGGARONG	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kelurahan
2	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Fasilitasi MTQ
3	KECAMATAN SEBULU	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
4	KECAMATAN SANGA-SANGA	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
5	KECAMATAN SAMBOJA	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
6	KECAMATAN MUARA WIS	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
7	KECAMATAN MUARA KAMAN	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
8	KECAMATAN MUARA JAWA	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
9	KECAMATAN MUARA BADAQ	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
10	KECAMATAN MARANG KAYU	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
11	KECAMATAN LOA KULU	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
12	KECAMATAN LOA JANAN	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
13	KECAMATAN KOTA BANGUN	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
14	KECAMATAN KENOHAN	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
15	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
16	KECAMATAN ANGGANA	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ
17	KECAMATAN MUARA MUNTAL	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780603 200212 1 002